

**SKRIPSI**

**PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA LIEUE  
KECAMATAN DARUSSALAM  
KABUPATEN ACEH BESAR**



**Disusun Oleh:**

**Zulfan Saputra  
NIM. 180602100**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M /1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zulfan Saputra

NIM : 180602100

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 April 2023

Yang Menyatakan,



B0D21AJX913039986  
Zulfan Saputra

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

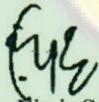
**Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat  
Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam  
Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam  
Kabupaten Aceh Besar**

Disusun Oleh:

Zulfan Saputra  
NIM. 180602100

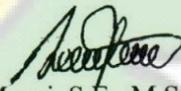
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak. CA  
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II



Seri Murni, S.E., M.Si., Ak  
NIDN. 197210112014112001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### **Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar**

Zulfan Saputra  
NIM. 180602100

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 April 2023 M  
27 Ramadhan 1444 H  
Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



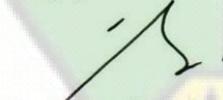
Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak. CA  
NIP. 198307092014032002

Sekretaris



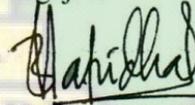
Seri Murni, S.E., M.Si., Ak  
NIDN. 197210112014112001

Penguji I



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

Penguji II



Hafidhah, S.E., M.Si., Ak. CA  
NIDN. 2012108203

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafis Fiqqani, M.Ec  
NIP. 198806252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zulfan Saputra  
NIM : 180602100  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : 180602100@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Banda Aceh  
Pada tanggal : 18 Juni 2023

Mengatahui,

Penulis

Zulfan Saputra  
NIM. 180602100

Pembimbing I

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak. CA  
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II

Seri Murni, S.E., M.Si., Ak  
NIDN. 197210112014112001

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, S.E., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

3. Hafiizh Maulana S.P., S.Hi., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA dan Seri Murni, S.E., M.Si., Ak selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku penguji I dan Hafidhah, SE., M.Si., Ak., CA selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan agar skripsi ini dapat sempurna.
6. Hafidhah, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
7. Seluruh perangkat beserta masyarakat Desa Lieve yang telah mengizinkan dan bekerjasama sehingga peneliti dapat melakukan penelitiannya di Desa Lieve dengan mudah.
8. Kedua orang tua yang terhormat dan tercinta Ayahanda Muhammad Yunus, Ibunda Hamidah dan abang Zulfikar dan Zulfikri yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moral maupun material yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.

9. Sahabat dan kawan seperjuangan khususnya Muhammad Haiqal, Tarmizi, Boja Caem, Mukhlis, dan Teuku Rian yang telah turut membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 18 April 2023  
Penulis,

Zulfan Saputra

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوْلَ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

Qala : قَالَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yaqūlu : يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

<i>Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl</i>	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
:	
<i>Al-Madīnah al-Munawwarah/</i>	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
:	
<i>alMadīnatul Munawwarah</i>	
<i>Ṭalḥah</i>	طَلْحَةَ
:	

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Zulfan Saputra  
NIM : 180602100  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar  
Jumlah Halaman : 170 Halaman  
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak. CA  
Pembimbing II : Seri Murni, S.E., M.Si., Ak

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan desa dengan baik diperlukan efektivitas dalam mengelola dana desa. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa diantaranya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 64 responden yang terdiri masyarakat Desa Lieue. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan mengedarkan pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Metode analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas pengelolaan dana desa dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $40,846 > 2,76$ . Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dibuktikan dengan nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$  yaitu  $2,581 > 2,000$ . Transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dibuktikan dengan nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$  yaitu  $2,900 > 2,000$ . Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dibuktikan dengan nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$  yaitu  $4,994 > 2,000$ .

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*

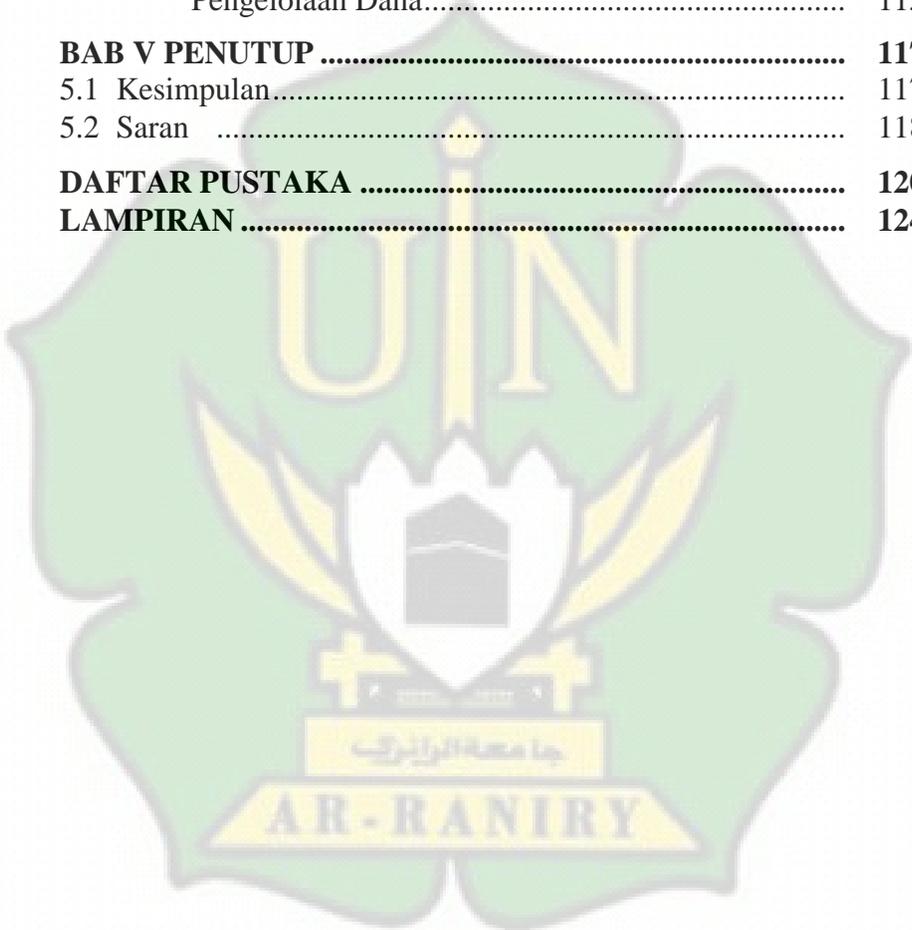
## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Akuntabilitas.....	14
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas .....	14
2.1.2 Konsep Akuntabilitas .....	16
2.1.3 Indikator Akuntabilitas .....	19
2.1.4 Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam .....	21
2.2 Transparansi .....	23
2.2.1 Manfaat Transparansi.....	25
2.2.2 Indikator Transparansi .....	26
2.2.3 Transparansi Dalam Perspektif Islam .....	26
2.3 Partisipasi .....	28
2.3.1 Konsep Partisipasi.....	29
2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat .....	30
2.3.3 Indikator Partisipasi .....	32
2.3.4 Partisipasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	32

2.4 Dana Desa.....	34
2.4.1 Prioritas Dana Desa.....	35
2.4.2 Pengelolaan Dana Desa.....	36
2.4.3 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa .....	39
2.5 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Desa.....	40
2.6 Penelitian Terkait.....	43
2.7 Kerangka Pemikiran .....	58
2.8 Keterkaitan Antar Variabel.....	59
2.8.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lieue.....	59
2.8.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lieue.....	60
2.8.3 Pengaruh Partisipasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lieue.....	61
2.9 Hipotesis .....	61
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
3.1 Desain Penelitian.....	63
3.2 Populasi dan Sampel.....	63
3.2.1 Populasi.....	63
3.2.2 Sampel.....	64
3.3 Sumber Data .....	65
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	66
3.4.1 Kuesioner .....	66
3.5 Devinisi dan Operasionalisasi Variabel.....	67
3.5.1 Akuntabilitas $X_1$ .....	68
3.5.2 Transparansi $X_2$ .....	68
3.5.3 Partisipasi $X_3$ .....	69
3.5.4 Pengelolaan Dana Desa Y.....	69
3.6 Teknik Analisis Data .....	72
3.6.1 Uji Validitas .....	72
3.6.2 Uji Reabilitas.....	73
3.7 Uji Asumsi Klasik .....	74
3.7.1 Uji Normalitas.....	74
3.7.2 Uji Multikolinearitas .....	75
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas.....	76
3.8 Analisis Regresi Linier Berganda.....	77

3.9 Pengujian Hipotesis .....	78
3.9.1 Uji Parsial (Uji T) .....	78
3.9.2 Uji Simultan ( Uji F) .....	79
3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ ).....	80
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	81
4.1.1 Kondisi Ekonomi .....	83
4.1.2 Kondisi Demografi Desa Lieue.....	84
4.2 Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	86
4.3 Karakteristik Responden .....	86
4.3.1 Usia .....	87
4.3.2 Jenis Kelamin.....	88
4.3.3 Pendidikan Terakhir.....	88
4.3.4 Pekerjaan.....	89
4.3.5 Pengalaman Menjadi Perangkat Desa.....	90
4.4 Deskriptif Statistik.....	91
4.5 Uji Validitas dan Reabilitas.....	96
4.5.1 Uji Validitas .....	96
4.5.2 Uji Reabilitas.....	98
4.6 Uji Asumsi Klasik .....	99
4.6.1 Uji Normalitas.....	99
4.6.2 Uji Multikolinearitas .....	100
4.6.3 Uji Heteroskedastisitas.....	101
4.7 Analisis Regresi Linier Berganda.....	103
4.8 Pengujian Hipotesis .....	105
4.8.1 Uji Parsial (Uji T) .....	105
4.8.2 Uji Simultan (Uji F) .....	107
4.8.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	109
4.9 Pembahasan .....	110
4.9.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	110
4.9.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	112

4.9.3 Pengaruh Partisipasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	113
4.9.4 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Secara Bersamaan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana.....	115
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
5.1 Kesimpulan.....	117
5.2 Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>124</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Besaran/Total Dana Desa Lieue Tahun 2020-202.	8
Tabel 2.1	Penelitian Terkait .....	49
Tabel 3.2	Skala Penilaian Jawaban Angket (Skala Likert)....	67
Tabel 3.3	Devinisi dan Operasionalisasi Variabel.....	70
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Disetiap Dusun/Jurong Desa Lieue .....	81
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Lieue Berdasarkan Usia Tahun 2022 .....	83
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 .....	84
Tabel 4.4	Profesi Dan Pekerjaan Kepala Keluarga Desa Lieue .....	84
Tabel 4.5	APBDesa Desa Lieue Tahun 2021 .....	86
Tabel 4.6	Hasil Tanggapan Responden Terhadap Akuntabilitas ( $X_1$ ).....	92
Tabel 4.7	Hasil Tanggapan Responden Terhadap Transparansi ( $X_2$ ).....	93
Tabel 4.8	Hasil Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi ( $X_3$ ) .....	94
Tabel 4.9	Hasil Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y) .....	95
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas .....	97
Tabel 4.11	Uji Reabilitas .....	98
Tabel 4.12	Hasil Uji Normalitas .....	99
Tabel 4.13	Uji Multikolinearitas.....	101
Tabel 4.14	Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Rank Spearman .....	102
Tabel 4.15	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	103
Tabel 4.16	Hasil Uji Parsial (Uji T).....	106
Tabel 4.17	Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	108
Tabel 4.18	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	110
Tabel 4.19	Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian .	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	58
Gambar 3.1	Hasil Perhitungan Besaran Sampel Menggunakan Raosoft .....	65
Gambar 4.1	Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	87
Gambar 4.2	Grafik Presentase Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	88
Gambar 4.3	Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	89
Gambar 4.4	Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	90
Gambar 4.5	Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Menjadi Perangkat Gampong.....	91
Gambar 4.10	Kerangka Pemikiran Setelah Pengujian.....	116

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	125
Lampiran 2 Data Jawaban Responden.....	128
Lampiran 3 Hasil Analisis Output .....	138
Lampiran 4 Uji Validitas dan Uji Reabilitas .....	140
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik.....	144



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemajuan akuntansi daerah khususnya di Indonesia semakin pesat, seiring dengan perubahan periode reformasi pada pelaksanaan peraturan pemerintahan, kemandirian wilayah dan desentralisasi fiskal yang menyoroti pemerintahan daerah. Cepatnya globalisasi yang menuntut keseriusan di setiap negara juga menuntut persaingan di masing-masing pemerintah provinsi, di mana daya saing pemerintah daerah seharusnya diwujudkan melalui perluasan otonomi pemerintahan. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Teritorial membuat perubahan akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keterusterangan dan akuntabilitas publik pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan publik (Sukhemi, 2010).

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk menangani semua penyelenggaraan pemerintahan di luar kekuasaan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan provinsi yang berkaitan dengan membangkitkan kesadaran masyarakat dan penguatan daerah, serta kemerdekaan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Akuntansi pemerintahan berperan dalam mengawasi dana masyarakat untuk mengakui administrasi yang besar, mulai dari

administrasi keuangan pusat, daerah dan juga desa. Standar dalam akuntansi pemerintahan, seperti transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi keuangan publik bukan hanya bentuk komitmen dari pemerintah pusat, tetapi juga untuk daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang mengelola wilayah setempat dengan segala landasan, kepentingan, dan kebutuhannya memegang peranan penting (Kisnawati et al., 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan wilayah yang sah yang mempunyai batas wilayah yang disahkan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan masyarakat wilayah setempat dalam rangka penggerakkan wilayah setempat, hak asal, atau kebebasan bergerak yang berpotensi dirasakan. Selanjutnya diperhatikan dalam susunan Badan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit kelompok pemerintahan yang mengelola wilayah setempat dengan segala landasan, kepentingan, dan kebutuhannya memegang peranan penting, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas dibidang administrasi publik. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan dan sumber daya desa telah dikelola untuk memberikan pelayanan dan jenis bantuan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa dana desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang dapat dihargai dengan uang dan segala sesuatu sebagai uang

dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, terlepas daripada itu dana kota harus dikelola dengan standar yang transparansi, bertanggung jawab, partisipatif, dan diselesaikan secara sistematis dan disiplin anggaran keuangan (Sukmawati dan Nurfitriani, 2019).

Alokasi dana desa merupakan anggaran keuangan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang sumbernya berasal dari pemungutan pajak daerah dan dari dana perbandingan keuangan pusat serta daerah yang diterima oleh setiap kabupaten yang kemudian disalurkan kesetiap desa. Undang-undang No. 22 Tahun 2015 Pasal 29 menyatakan bahwa persamaan persebaran ditentukan berdasarkan jumlah desa, dengan beban 90 persen dan hanya 10 persen ditentukan dengan memperhatikan skala jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kemerosotan geografi. Pemerintah lebih menekankan pada standar nilai, di mana setiap desa memiliki ukuran alokasi anggaran dana desa yang pada umumnya setara. Melalui adanya anggaran dana desa dapat menjadikan sebagai sumber pendapatan bagi setiap desa.

Proses alokasi anggaran dana desa untuk setiap desa dapat berbeda dalam beberapa faktor yakni tingkat populasi penduduk, tingkat kemiskinan, luasnya wilayah dan tingkat kesulitan. Tujuan utama pada pengalokasian dana desa ialah untuk tercapainya tujuan perkembangan desa, mensejahterakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan mengurangi tingkat kemiskinan dan

pemberdayaan masyarakat kearah yang lebih maju. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana tingkat akuntabilitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, kepedulian kelompok organisasi, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel sehingga dapat tercapainya kesejahteraan didalam masyarakat (Makalalag et al., 2017).

Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota merupakan insentif bagi masyarakat desa untuk mandiri dalam mengembangkan wilayahnya. Untuk memperoleh manfaat, untuk mencapai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, hal tersebut perlu dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Masyarakat berhak mengetahui kemana dana dialokasikan dan mereka juga diberikan kewenangan untuk mengawasi pembangunan desa agar dana desa yang digunakan tidak digelapkan dan disalurkan sesuai peraturan dan undang-undang di Indonesia (Boedijono et al., 2019).

Dalam Peraturan Bupati Aceh Besar nomor 28 tahun 2021 pasal 4 menyebutkan prioritas penggunaan dana desa untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal tingkat desa/gampong bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan dan kondisi darurat dan mendesak desa. Prioritas ini bertujuan untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa seperti peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan mengurangi

kemiskinan serta meningkatkan pelayanan publik tingkat desa (Perbup no. 28 tahun 2021).

Mardiasmo (2009) dalam Aziiz dan Prastiti (2019) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu standar administrasi yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemajuan latihan atau program yang dibentuk dan digerakkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi tanggung jawab, penyedia, pemberitahuan, dan pengungkapan semua pekerjaan yang dilakukan kepada kepala yang memberikan pekerjaan. Berdasarkan definisi tersebut, akuntabilitas memainkan peran penting dalam mengatasi penyimpangan dan penyalahgunaan kekayaan untuk kepentingan umum (Jorge dan Pattaro, 2011 dalam Prastiti, 2019 ). Akuntabilitas yang layak dapat tercapai apabila informasi yang dipaparkan mudah untuk dimengerti. Kelompok masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik memiliki hak untuk mendapatkan data keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi kepada pemerintah (Mardiasmo, 2002 dalam Rasmini, 2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi sistem keuangan desa karena keberadaan sistem keuangan desa merupakan jawaban untuk mengelola dana desa yang masih belum terlalu besar dan dengan sistem ini juga dapat membatasi paksaan anggaran dana desa. Semakin baik penggunaan kerangka keuangan

desa, semakin baik juga pemenuhan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Adapun arti dari tranparansi adalah bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi dari pemerintah kepada oknum-oknum yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kekayaan publik. Transparansi dapat dimaknai bahwa setiap masyarakat memiliki kewajiban dan kesempatan yang setara untuk mengetahui proses anggaran yang terkait dengan kepentingan dan harapan masyarakat, yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa pemerintah harus memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban. Mewujudkan anggaran yang efektif dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan masukan untuk proses penyusunan tujuan dan kebijakan anggaran. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan konsep dasar tingkat partisipasi masyarakat desa. Semua kegiatan yang didanai dana desa direncanakan secara transparan melalui Musrenbangdes yang hasilnya dicantumkan dalam peraturan desa tentang APBG serta dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan peran masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, hasilnya berdampak terhadap proses evaluasi dan mengawasi

kinerja pemerintah serta mengurangi penyelewengan kewajiban. Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan kemampuan yang terdapat pada masyarakat, memilah, dan mencari solusi paling mudah dilakukan dalam menangani permasalahan. Masyarakat juga diharapkan juga terlibat langsung dalam penyusunan APBG serta mengawasi kegiatan pemerintah dilapangan. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat maka akan meminimalisir terjadinya penyimpangan yang bisa saja terjadi serta masyarakat juga harus memiliki pemahaman mengenai proses penyusunan dan pengalokasian anggaran dana (Utami dan Efrizal, 2013 dalam Rasmini, 2019).

Terlepas dari kenyataan bahwa dana desa juga memiliki efek positif, keberadaan dana desa juga menimbulkan masalah, khususnya potensi kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Mempertimbangkan bahwa anggaran dana desa dibagikan pada setiap tahun dalam jumlah yang relatif besar, maka berkemungkinan anggaran dana desa tersebut dapat terjadi penyalahgunaan oleh pemerintah desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Untuk dapat tercapainya pengelolaan dana desa yang baik dan sungguh-sungguh. Menurut ajaran islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan baik, benar, tertib dan teratur. Prosesnya harus diikuti dengan benar dan tidak asal-asalan, arah kerja yang jelas dan landasan yang kokoh

serta cara yang transparan untuk mencapainya akan menghasilkan kegiatan yang diridhai dan diberi petunjuk oleh Allah SWT. Inilah prinsip utama ajaran Islam. Manajemen menurut prinsip ini, dalam arti segala sesuatu diatur sedemikian rupa sehingga dilakukan dengan benar, tepat dan teliti, sebagaimana yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

Dalam penelitian ini yang mengkaji akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas terhadap pengelolaan dana desa di desa Lieve yang merupakan sebuah desa di Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Darussalam telah menerima dana desa dari beberapa tahun belakangan dengan besaran dana yang bervariasi, penulis melampirkan besaran dana desa yang diterima desa Lieve Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Darussalam pada tahun 2020-2022 dengan besaran pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Besaran/Total Dana Desa Lieve Tahun 2020-2022**

Tahun	Sumber Dana (Rp)				Total
	Dana Desa	Alokasi Dana Gampong (ADG)	Pendapatan Asli Gampong (PAG)	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	
2020	Rp710.088.000	Rp293.655.670	Rp30.000.000	Rp10.988.700	Rp1.044.732.370
2021	Rp742.250.000	Rp292.112.680	Rp20.000.000	Rp10.104.166	Rp1.064.462.320
2022	Rp682.093.000	Rp223.592.330	Rp35.000.000	Rp11.540.856	Rp952.226.186

Sumber: APBG Desa Lieve Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1. 1 dapat dilihat bahwa total anggaran dana Desa Lieue tahun 2020 adalah sebesar 1,04 milyar rupiah yang bersumber dari Dana Desa sebesar 710 juta rupiah, Alokasi Dana Gampong (ADG) sebesar 293,6 juta rupiah, Pendapatan Asli Gampong (PAG) sebesar 30 juta rupiah, dan bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 10,9 juta rupiah.

Pada tahun 2021 total anggaran dana Desa Lieue sebesar 1,06 milyar rupiah yang bersumber dari Dana Desa sebesar 742,2 juta rupiah, Alokasi Dana Gampong (ADG) sebesar 292,1 juta rupiah, Pendapatan Asli Gampong (PAG) 20 juta rupiah, dan bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 10,1 juta rupiah.

Selanjutnya pada tahun 2022 total anggaran Desa Lieue sebesar 952,2 juta rupiah yang bersumber dari Dana Desa sebesar 682 juta rupiah, Alokasi Dana Gampong (ADG) sebesar 223,5 juta rupiah, Pendapatan Asli Gampong (PAG) 35 juta rupiah, dan bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 11,5 juta rupiah. Dengan dana desa tersebut diharapkan dapat memberikan infrastruktur yang baik bagi masyarakat desa Lieue dan dapat mensejahterakan masyarakat.

Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang optimal maka diperlukan upaya dan kerja keras pengurus dan keikursertaan semua lapisan masyarakat. Pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, saluran irigasi, lahan pertanian dapat menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan non fisik seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tidak boleh dikesampingkan karena demikian juga

diperlukan untuk keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik.

Adapun tujuan dilaksanakannya pengelolaan dana desa tersebut adalah untuk mewujudkan program pemerintah dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dengan tercapainya tujuan ini akan adanya pemerataan pembangunan disetiap daerah, terbuka kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat desa. Berdasarkan pernyataan tersebut diharapkan kepada pemerintah desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi demi terwujudnya efektivitas dalam pengelolaan dana desa. Dari latar belakang diatas, maka judul dari penelitian ini adalah: **“Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah penerapan prinsip transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah penerapan prinsip partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?

4. Apakah prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi secara bersamaan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar dan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa Lieue terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue.
3. Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)**

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan ilmu serta pemahaman mengenai akuntabilitas transparansi dan partisipasi masyarakat desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dalam pengelolaan dana desa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi pembaca terkait akuntabilitas transparansi dan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis)**

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang luas tentang efektivitas pengelolaan dana desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi atau masukan kepada peneliti dimasa yang akan datang terutama penelitian yang berkaitan dengan dana desa.

#### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini ditulis dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran terkait isi proposal skripsi sehingga memberikan hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun isi dari bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis lebih dahulu menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas didalamnya yang diperoleh dari berbagai referensi dan bacaan-bacaan yang dianggap memiliki keterkaitan oleh penulis dan penelitian terdahulu juga kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Selanjutnya pada bab ini penulis mulai memaparkan tentang metodologi penelitian yang dipakai beserta sebabnya, lokasi melakukan penelitian, sampel sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengujian keabsahan data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis mulai mendeskripsikan mengenai data-data yang dipakai dalam penelitian, berdasarkan hal-hal yang telah dibahas pada bab II dan III. Pada bab ini jug peneliti mulai memapaskan hasil dari penelitian mengenai analisis data perolehan empiris dari penelitian, hasil dari pengujian hipotesis dan pembahasan dari analisis data.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan, keterbatasan dari penelitian serta memberikan saran-saran mengenai hal-hal yang harus diperbaiki dalam penelitian dan dianggap perlu untuk dilakukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Akuntabilitas**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Ayu Komang dalam Nufidah & Anisa (2017) akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja dari pemimpin atau pejabat suatu lembaga organisasi kepada pihak yang telah memberi jabatan atau yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan lebih baik apabila didukung oleh sistem akuntansi yang memadai yang dapat memberikan informasi yang jelas, akurat serta bisa memberikan pertanggungjawaban. Akuntabilitas pada pemerintahan desa merupakan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan berkaitan dengan hal pembangunan dan pemerintahan desa (Sukasmanto dalam Nufidah & Anisa, 2017).

Mardiasmo (2009) dalam Aziiz & Prastiti (2019) Akuntabilitas adalah salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang mempunyai makna penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dibangun dan dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas memiliki pemahaman yang cukup luas menyangkut pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan semua kegiatan agen terhadap pemberi amanah (principal).

Kamus Besar Akuntansi (2000: 7) dalam Darwanis & Chairunnisa (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai tanggung jawab individu atau bagian/departemen yang berhubungan dengan kinerja suatu fungsi tertentu. Akuntabilitas dapat ditetapkan atau diformulasikan berdasarkan aturan hukum atau perjanjian tertentu. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui jika pemerintah tidak memberitahukan kepada rakyat mengenai informasi berkaitan dengan pengumpulan sumber daya dan berita dari masyarakat beserta penggunaannya. Berdasarkan bentuk paling sederhana akuntabilitas adalah hubungan otoritatif bahwasanya seseorang diberikan hak legal untuk meminta kejelasan orang lain yakni memaparkan penjelasan mengenai perbuatan atau tindakannya, apresiasi atau sanksi diberikan kepada pihak kedua berkaitan dengan kinerja sudah sesuai atau tidak dengan yang diberikan oleh pihak pertama (Kelman & Hamilton dalam Raba 2020: 8).

Akuntabilitas ialah syarat terhadap terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Kelembagaan pemerintah yang berakuntabilitas bermakna lembaga tersebut akan selalu bersedia mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diawasi oleh rakyat. Begitu juga masyarakat dalam melakukan pengawasan memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk kepentingan bersama. Tidak hanya sebagai kepentingan kelompok maupun golongan tertentu saja. Tanggung jawab masyarakat untuk

melakukan pengawasan terhadap lembaga pemerintah merupakan wujud dari partisipasi masyarakat. Akuntabilitas terhadap masyarakat sebaiknya dibarengi dengan tersedianya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat. (Raba, 2020).

### **2.1.2 Konsep Akuntabilitas**

Sebagai suatu konsep, akuntabilitas adalah sebuah gagasan kemana kata terkait, namun tidak satupun yang secara efektif mencakupnya menurut kerangka definisinya (Dubnick, 2002 dalam Raba, 2020). Akuntabilitas timbul sebagai karakteristik utama *governance* dalam status dimana adanya perasaan kesepakatan tentang legitimasi ekspektasi dalam anggota komunitas. Menurut konseptual, akuntabilitas dapat dilihat sebagai bentuk *governance* yang terkait dengan interaksi dan mekanisme sosial dinamis yang terlahir pada komunitas moral seperti itu. Konsep akuntabilitas mencakup sejumlah gagasan yang berhubungan dengan:

- a. Hubungan terstruktur dan informal, internal dan eksternal dalam berbagai organisasi, anggotanya dan masyarakat umum.
- b. Keyakinan, nilai dan standar etika moralitas.
- c. Kekuasaan dan otoritas yang sah.
- d. Perilaku dan tindakan politik dan administrasi.
- e. Kepentingan publik, keadilan sosial, dan pengesampingan kepentingan individu atau organisasi atas kepentingan masyarakat umum.

- f. Melayani publik dan memperlihatkan respon terhadap kepentingan masyarakat dan warga.
- g. Tanggung jawab kepada kekuasaan yang lebih tinggi dan memberikan kinerja yang efektif serta perilaku dan tindakan yang baik.
- h. Berbagai mekanisme kontrol formal maupun informal, internal maupun eksternal, sukarela ataupun paksaan.

Menurut Muhammad Sawir (2017) suatu prinsip utama dan sangat penting dalam mewujudkan *governance* ialah akuntabilitas. Pada kehidupan dunia birokrasi pemerintah, akuntabilitas adalah suatu konsep yang dipakai untuk mendeskripsikan dan memperlihatkan pencapaian target dari organisasi. Suatu organisasi yang akuntabel sudah menjadi sebuah hal yang akan diteruskan diperdebatkan oleh banyak kalangan dan bisa menjadi harapan masyarakat terhadap keberadaan institusi pemerintah dalam pengelolaannya termasuk dalam lingkup pengambilan kebijakan dalam pemerintahan.

Akuntabilitas bagian dari konsep etika yang erat dengan administrasi publik dan pemerintahan yang mempunyai makna yang kadang dijabarkan sama dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipertanyakan, dapat dipermasalahkan, dan yang memiliki ketidakbebasan, tergolong juga istilah lain yang memiliki keterkaitan dengan keinginan dapat memaparkannya salah satu aspek daripada administrasi publik (Djalil, 2014 dalam Sawir, 2017).

Prinsip akuntabilitas menitikkan bahwasanya setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan melalui suatu organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada umum. Sawir (2017) menyatakan bahwa ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel ialah:

- a. Kesanggupan dalam menyajikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dengan transparan, cepat dan akurat kepada masyarakat.
- b. Sanggup dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.
- c. Setiap kebijakannya harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kepada umum.
- d. Sanggup menyediakan sarana bagi masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- e. Serta sebagai tempat atau sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah.

Menurut Sawir (2017) Ada tiga hal utama yang menjadi prasyarat terbentuknya akuntabilitas, yaitu :

- a. Adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan dengan menerima masukan serta mengikutsertakan setiap komponen dalam mengelola pemerintahan.
- b. Adanya standar kinerja pada setiap institusi yang bisa diukur dalam melaksanakan kewajiban dan fungsi serta wewenangnya.

- c. Adanya partisipasi untuk saling mewujudkan suasana kondusif dalam mewujudkan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang terjangkau serta pelayanan yang cepat.

### **2.1.3 Indikator Akuntabilitas**

Tjahjanulin (2002) dalam Sawir (2017) berpendapat bahwa akuntabilitas ialah kewajiban atas pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas setiap tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya.

Ada beberapa bentuk indikator akuntabilitas menurut krina (2003) yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan mesti dibuat dalam bentuk tertulis dan tersedia untuk setiap warga yang membutuhkan. Proses untuk mengetahui keputusan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan yaitu adanya tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program dan kebijakan pembangunan di daerah.
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi. Proses untuk mengetahui akurasi dan kelengkapan informasi adalah informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan sudah disampaikan kepada masyarakat dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap meliputi seluruh program/kebijakan di daerah.

- c. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan. Cara untuk mengetahui penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan adalah setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan pemerintah di daerah sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan sudah tersedia informasi dalam bentuk tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat mengenai program dan kebijakan di daerah.
- d. Kelayakan dan konsistensi. Proses untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi yakni dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati oleh masyarakat sebelumnya, kebijakan dan program yang dilaksanakan apakah layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan kesepakatan kebijakan yang sudah disepakati.
- e. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan. Proses untuk mengetahui penyebarluasan informasi mengenai sebuah keputusan yaitu dengan adanya hasil dari sebuah keputusan kebijakan daerah yang disebarakan di media masa dan masyarakat akan memperoleh informasi mengenai program dan kebijakan pembangunan.

Menurut Rahardjo Adisasmito akuntabilitas dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian diantaranya (Setiawan et al., 2017).

- a. Akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, megungkapkan dan kepatuhan terhadap

peraturan perundangan. Fokus sasaran pertanggungjawaban ini ialah mengenai laporan keuangan yang disediakan dan peraturan perundangan yang berlaku penerimaan, penyimpangan, pengeluaran keuangan oleh instansi pemerintah.

- b. Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya semua aparatur pemerintah dipandang dapat melakukan dari tujuan dan tugasnya tidak hanya patuh terhadap peraturan dan kebutuhan hierarki atau prosedur, efektivitas ini pada dasarnya memberikan perhatian kepada hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah.
- c. Akuntabilitas prosedural, Akuntabilitas ini merupakan proses pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan kebijakan sudah mempertimbangkan masalah moralitas etika, kepastian hukum, dan kepatuhan kepada keputusan pemerintah untuk memperoleh hasil dari tujuan akhir yang telah ditetapkan.

#### **2.1.4 Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam**

Menurut Sudaryanti (2011) Konsep akuntabilitas dalam Islam diturunkan dari dua pijakan utama yaitu konsep tauhid dan konsep kepemilikan. Konsep tauhid adalah penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Penyerahan diri sepenuhnya bermakna segala aktivitas hidup manusia hanya ditujukan untuk Allah. Dengan kata lain, segala aspek kehidupan manusia harus sejalan dengan ketentuan Allah SWT, sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan

Hadits. Dengan perspektif ini, ketentuan dalam Alquran dan hadits adalah cara hidup seorang muslim. Konsep kepemilikan dalam Islam menyatakan bahwa pemilik segala isi langit dan bumi adalah Allah, sebagai pencipta alam semesta. Manusia hanya sebagai pengelola ciptaanNya. Kepemilikan pribadi dalam Islam dikerangkakan sebagai titipan dari Allah, termasuk anak yang kita lahirkan. Jadi Islam masih mengakui hak kepemilikan pribadi, namun tidak bersifat absolute.

Terkait dengan konsep pertanggungjawaban manusia, terdapat beberapa surat dalam Al-Quran yang mengaturnya seperti firman Allah SWT. dalam surat Al- Infithaar ayat 10-12.

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: *“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. Al-Infithaar: 10 -12).

Jadi bisa disimpulkan bahwa, dalam Islam setiap muslim dituntut bertanggungjawab atas segala tindakannya pada Allah swt. Pada hari kebangkitan nanti. Dalam Islam, pertanggungjawaban manusia tidak hanya antar manusia tapi juga pada Allah. Setiap muslim yang taat akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya baik dengan sepengetahuan orang lain atau tidak,

karena ia tahu Allah Maha Mengetahui apapun yang ia lakukan. Seorang muslim dituntut untuk melaksanakan semua aktivitasnya sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Cara hidup seorang muslim sudah diatur oleh Allah lewat Syariah Islam yang tertuang dalam Quran dan Hadist (Basri, 2018).

## **2.2 Transparansi**

Coryanata (2007) menyatakan bahwa transparansi merupakan pemberian informasi keuangan dengan akurat dan sesuai dengan fakta, jujur dan terbuka kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola kekayaan dan sumber daya yang telah diberi kepercayaan kepadanya dan kepatuhannya kepada peraturan perundangan-undangan. Dengan adanya penyelenggaraan pemerintah yang transparan maka akan memiliki kriteria yaitu tersedia pertanggungjawaban yang terbuka, kemudahan dalam mengakses terhadap laporan keuangan, tersedianya publikasi laporan keuangan, memiliki hak sepenuhnya untuk mengetahui hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja (dalam Auditya et al., 2013).

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah pada saat menjalankan amanah rakyat transparansi menjadi satu hal yang sangat penting. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap

mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Dalam pendapat lain tranparansi juga dimaknai sebagai bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa. Transparansi dianggap suatu hal yang diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin efektif pengelolaan dana desa. Teori keagenan menjelaskan adanya asimetri informasi, yaitu keadaan dimana principal tidak memperoleh informasi yang sama dengan agent, sehingga dengan adanya transparansi yang tinggi principal dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya dan terjadinya asimetri informasi dapat dihindari (Putra Darma & Rasmini, 2019).

Sejak terbit peraturan UU No. 6/2014 mengenai desa, transparansi merupakan isu yang sangat penting dikarenakan adanya sejumlah dana yang relatif besar dilakukan pengelolaan kepada pemerintah desa. Desa merupakan suatu kelompok

masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah diberi hak untuk mengurus dan mengatur masalah pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam hal keuangannya. Desa diharap mengurus dan mengatur pemerintahnya melalui pengelolaan dana desa dalam bentuk APBDes (Julita & Abdullah, 2020).

### **2.2.1 Manfaat Transparansi**

Folscher dalam Julita & Abdullah (2020) mendefinisikan beberapa manfaat dengan adanya transparansi adalah:

- a. Transparansi akan meminimalisir ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian dimasa mendatang akan dapat diminimalisir.
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif, media dan masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol kepada pemerintah lebih baik saat mereka memiliki informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta penerimaan/pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggungjawab jika keputusan yang diambil dilaksanakan dengan terbuka/transparan kepada publik dan dapat mecegah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Transparansi bisa meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan membentuk hubungan sosial yang lebih erat,

seperti masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut.

- d. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas mengenai kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi lebih banyak.

### **2.2.2 Indikator Transparansi**

Menurut Kristiaten dalam Julita & Abdullah (2020) menyatakan bahwa standar transparansi anggaran yang bisa digunakan dalam mengukur transparansi pada perencanaan dan penganggaran transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

- a. Tersedianya dan kemudahan dalam mengakses dokumen anggaran.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran.
- c. Keterbukaan proses.
- d. Kerangka regulasi atau sebuah peraturan yang menjamin transparansi.

### **2.2.3 Transparansi Dalam Perspektif Islam**

Dalam Islam, transparansi diartikan sebagai *shiddiq* yang berarti kejujuran. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip transparansi atau prinsip kejujuran dalam segala aspek kehidupan, karena kejujuran dapat membawa pada kebaikan dan menghindarkan dari segala keburukan, sebagaimana nilai-nilai

yang terdapat dalam ekonomi syariah salah satunya adalah keadilan dan mengancam kezaliman, sebab kezaliman dapat menciptakan kecurangan. Kejujuran (*shiddiq*) tersebut adalah suatu kewajiban yang tidak bisa dijalankan tanpa adanya penerapan prinsip transparansi. Oleh karena itu berdasarkan kaidah tersebut, maka melakukan transparansi anggaran adalah wajib. Dalam pandangan Islam, menghindari transparansi anggaran adalah suatu kemaksiatan (Utami, 2018). Transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Ketika menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satu pun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi termasuk harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (An-Nahl [16] : 101).

Surat An-Nahl ayat 101 mencerminkan bahwa seorang pemimpin harus transparan dan mengatakan yang sesungguhnya tanpa mengurangi atau melebihkan, sehingga masyarakat yang

dipimpin akan menerima dengan terbuka tanpa merasa dicurangi (Sudaryanti, 2011).

Transparansi dalam lingkup pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan. Transparansi akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, karena transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kinerja pemerintah pada masyarakat.

### **2.3 Partisipasi**

Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Efrizal, 2013 dalam Rasmini, 2019).

Menurut Rahayu (2010) masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan APBD dan masyarakat juga ikut mengawasi semua kebijakan pemerintah dilapangan. Tanpa kontrol penuh dari masyarakat, bermacam bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu faktor yang harus untuk diketahui oleh masyarakat yaitu mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat telah mengetahui bagaimana tahapan penyusunan anggaran yang sebetulnya, dengan demikian

diharapkan masyarakat akan ikut serta dalam mengawasi anggaran (Putra Darma & Rasmini, 2019).

Peraturan Bupati Aceh Besar nomor 28 tahun 2021 pasal 38 menyatakan masyarakat dapat berpartisipasi dan ikut serta dalam mamantau serta mengawasi penetapan prioritas penggunaan dana desa yang akuntabel dan transparan melalui cara:

- a. Menyampaikan pengaduan masalah penerapan prioritas penggunaan dana desa.
- b. Mendampingi desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.3.1 Konsep Partisipasi**

Pelaksanaan pembangunan yang mencakup segala aspek kehidupan baru akan terwujud apabila merupakan usaha yang menyertakan semua lapisan masyarakat (Tumbel, 2017). Menurut Cohen & Uphoff (1977) dalam Tumbel (2017) membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahap pengambilan keputusan, proses ini diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat pada saat pelaksanaan rapat-rapat. Proses pengambilan keputusan yang dimaksud ialah perencanaan kegiatan.
- b. Tahap pelaksanaan, merupakan tahap terpenting pada proses pembangunan, dikarenakan pokok dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yakni partisipasi pada wujud

sumbangan pemikiran, wujud sumbangan materi, dan wujud tindakan sebagai anggota program.

- c. Tahap menikmati hasil, yang dapat dimasukkan kedalam indikator keberhasilan dari bentuk partisipasi masyarakat adalah pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. disamping itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka bertambah besar manfaat program dirasakan, dengan demikian program tersebut berhasil sesuai dengan perencanaan.
- d. Tahap evaluasi, pada tahap ini partisipasi masyarakat dipandang penting karena merupakan umpan balik yang bisa memberi petunjuk untuk memperbaiki pelaksanaan program berikutnya.

### **2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Menurut Pangestu (1995) dalam Tumbel (2017) partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor internal, meliputi karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi pada suatu kegiatan. Karakteristik individu meliputi umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.
- b. Faktor eksternal, mencakup hubungan yang terjalin diantara pihak pengelola proyek dengan target yang dapat

mempengaruhi partisipasi karena target akan dengan sukarela terlibat dalam sebuah proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Disamping itu jika didukung menggunakan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh target, oleh karena itu target tersebut tidak akan sungkan untuk dapat berpartisipasi dalam proyek.

Menurut Kartika (2012) Partisipasi berdasarkan pandangan dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek positif dan negatif yaitu:

- a. Partisipasi pada perencanaan, aspek positifnya adalah partisipasi dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program- program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama. Sedangkan negatifnya adalah kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan bersama.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan. Sudut positifnya adalah program yang telah direncanakan dapat selesai dikerjakan. Akan tetapi sudut negatifnya adalah cenderung menempatkan warga masyarakat sebagai objek pembangunan dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tidak didorong untuk memahami dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tak terhindarkan.

### **2.3.3 Indikator Partisipasi**

Menurut Kartika (2012) ada tiga indikator partisipasi masyarakat:

- a. Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat
- b. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses
- c. Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

### **2.3.4 Partisipasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Islam memandang partisipasi masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung dalam membangun ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong partisipasi masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama yaitu Prinsip ukhuwwah, Prinsip ta'awun, dan Prinsip persamaan derajat (Abu Bakar, 2020).

Abu Bakar (2020) menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada hubungan darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Ukhuwwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya partisipasi masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling

menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan. Ta'awun atau tolong-menolong merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Dalam berpartisipasi harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwwah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Al-Imran: 92).

Ekonomi Islam juga mendorong pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi membangun kepentingan bersama. Dalam ekonomi Islam pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama. Jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian.

## 2.4 Dana Desa

Dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh sebab itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dengan terlebih dahulu dilaksanakannya musyawarah perencanaan dan pembangunan desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat biasa. Dana desa bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya membangun yang bersifat fisik saja yang diutamakan tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuh kembangkan kemandirian desa terhadap pemenuhan kebutuhan dan terlepas dari rantai kemiskinan (Hulu et al., 2018).

Tujuan utama dana desa adalah untuk membantu masyarakat dalam sektor kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, dan dapat meningkatkan potensi ekonomi lokal yang didasari pada kondisi dan potensi desa. Arthur Lewis membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikut sertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur

supaya tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota, hal ini juga dapat membangun Indonesia kearah lebih baik melalui peningkatan perekonomian yang melibatkan partipasi masyarakat secara langsung. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan (Kuncoro, 2010 dalam Herion et al., 2022).

#### **2.4.1 Prioritas Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 memprioritaskan penggunaan dana desa untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa, Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani, dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di desa. Tujuan dari keputusan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengalokasian Dana Desa yang efektif dan efisien. Penggunaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keselarasan antara perwujudan visi dan misi pembangunan nasional dengan visi dan misi pembangunan daerah dan desa.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis, keluarga miskin penerima jaring pengaman

sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN, keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan belum menerima bantuan, atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Kemudian Terkait kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani pemerintah desa mengalokasi dana desa dengan melakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik dan potensi desa. Terakhir kegiatan penanganan pandemi Covid-19, itu dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana desa ke pos komando penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa atau pos jaga di desa.

Berdasarkan peraturan bupati Aceh Besar nomor 28 tahun 2021 prioritas penggunaan Dana Desa diprioritaskan pada pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal tingkat desa sektor penyelenggaraan pemerintahan desa/gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan masyarakat gampong, pemberdayaan masyarakat gampong dan penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak gampong. Prioritas ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa/gampong berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan pelayanan publik pada tingkat desa (Perbup no. 28 tahun 2021).

#### **2.4.2 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 ialah keseluruhan kegiatan yang

mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa (Boedijono et al., 2019).

- a. Perencanaan, Perencanaan pembangunan menurut Yabbar dan Hamzah (2015) dalam Boedijono et., al (2019) merupakan proses tahapan kegiatan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pelaksanaan, Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah implementasi APBDesa. Proses pelaksanaan merupakan suatu usaha untuk menjalankan APBDesa pada satu tahun anggaran periode biasanya dari awal tahun tanggal 1 Januari hingga akhir tahun tanggal 31 Desember.
- c. Penatausahaan, penatausahaan merupakan sebuah kegiatan dalam bidang keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip standar dan prosedur sehingga menghasilkan informasi mengenai keuangan. Hasil dari penatausahaan adalah pemberitahuan/laporan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- d. Pelaporan, pelaporan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyampaian hal-hal yang terkait dengan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan selama satu periode sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban atas kewajiban yang dilimpahkan.

e. Pertanggungjawaban, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa ialah ukuran yang dipakai dalam menghitung tingkat kesesuaian pelayanan diselenggarakan dengan ukuran nilai atau norma yang berlaku di masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa semestinya dilaksanakan dengan manajemen yang sempurna dan akuntabel, dikarenakan dana yang masuk ke desa bukanlah dana dengan jumlah yang kecil, melainkan dana dengan jumlah yang sangat besar untuk dikelola oleh pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 dijelaskan, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dalam peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 68 ayat 1 poin c, dinyatakan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (Dethan, 2019). Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Sebagai berikut:

a. Memajukan penyelenggaraan pemerintah desa terhadap pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan kewenangannya.

- b. Mengembangkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa, dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan berdasarkan partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan berkerja bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Dengan terselenggaranya alokasi dana desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan akan terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu pemberian dana bantuan dari pemerintah.

#### **2.4.3 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Kurniawan (2005) dalam Dethan (2019) efektivitas merupakan kemampuan menjalankan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dalam suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektifitas adalah skala untuk mengukur sejauh mana pemerintah memiliki kemampuan dalam pelaksanaan pengelolaan dana keuangan sampai dimana tujuan dan target yang direncanakan awal dapat terwujud berdasarkan tujuan dan prosedur yang tersedia.

Dalam mengukur efektivitas pengelolaan dana desa ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan yakni:

- a. Pencapaian tujuan, penggunaan dana desa bisa dikatakan efektif jika penggunaannya sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut terlaksanakan.
- b. Ketetapan waktu, sistem penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sampai berakhirnya kegiatan.
- c. Sesuai manfaat, sebagai penerima program masyarakat desa harus merasakan semua manfaat dari pengelolaan dana desa tersebut.
- d. Hasil dari pengelolaan dana desa sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Dengan demikian efektivitas adalah ukuran kemampuan lembaga pemerintahan untuk mengelola keuangannya sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan awalnya. Dalam hal pengelolaan keuangan, sejauh mana dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan.

## **2.5 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam telah mengajarkan secara jelas dan rinci tentang kajian rencana sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman tindakan atas berbagai persoalan kehidupan. Al-Qur'an menekankan bahwa tujuan utama dari semua

ajaran Islam adalah untuk menunjukkan belas kasihan kepada alam semesta. Islam adalah *Rahmatan Lil Alamin* (rahmat untuk sekalian alam) menjadikannya tujuan utama pembangunan dari sudut pandang ekonomi Islam dan tujuan kebajikan (kemakmuran, kedamaian, ketenteraman, kebenaran) terhadap seluruh alam semesta (manusia, tumbuhan, hewan, lingkungan, udara, dan lain-lain). Cara melakukannya adalah dengan meningkatkan *falah* atau kebahagiaan sejati bagi semua manusia di bumi tanpa memandang ras, warna kulit, usia, jenis kelamin, atau kebangsaan (Saud, 1991 dalam Herion et al., 2022).

Pengelolaan keuangan islam adalah praktik pengelolaan keuangan yang bertujuan memperhatikan bagaimana diterima, bagaimana digunakan dan mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an tentang pengelolaan keuangan dalam surah Al-Isra' ayat 26-27.

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

*Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.(Q.S. Al-Isra: 26-27).*

Ekonomi Islam menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Tujuan ekonomi Islam adalah menjalankan misi khilafah di muka bumi dan membuatnya berkembang. Umat Islam percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas tugasnya di hadapan Allah SWT. Perolehan materi dari kegiatan ekonomi merupakan tujuan antara umat Islam untuk mencapai cita-cita kemanusiaan berupa ketundukan kepada Allah SWT. Dengan kata lain, cita-cita ekonomi Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli, atau keegoisan dengan mengumpulkan semua kekayaan di dunia dan menahannya dari orang lain, seperti sistem ekonomi yang diciptakan manusia. Cita-cita ekonomi Islam adalah mencapai kekayaan, kemakmuran, dan keuntungan bagi seluruh masyarakat dengan maksud menegakkan hukum-hukum kekhilafahan dan menaati ketetapan Allah SWT.

Menurut ilmu ekonomi Islam tujuan pengalokasian dana/keuangan adalah untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Menjadikan setiap pekerjaan sebagai suatu kecondongan jiwa kepada kecintaan kepada Allah SWT. Sehingga yang kita lakukan dalam mengelola keuangan tidak hanya untuk kepentingan dunia ini saja, tetapi juga prioritas pada akhirat nanti. Bagi umat Islam untuk saling mengawasi dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk mencapai hasil yang memuaskan harus berdasarkan aturan, pada permasalahan akuntabilitas atau pertanggungjawaban maupun pada musyawarah perencanaan dan alokasi keuangan (Herion et al., 2022).

Menurut Arifin Tahir (2014) Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan dana desa pada penerapan akuntabilitas perspektif Islam dapat diwujudkan apabila pemerintah desa melaksanakan kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban terhadap masyarakat atau lembaga yang memiliki hak menerima pertanggungjawaban. Karena pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditentukan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah. Adapun transparansi dalam mengelola dana desa harus berlandaskan nilai-nilai islam didalamnya dengan niat karena Allah SWT. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, segala bentuk kegiatan baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat merupakan perbuatan baik karena bermanfaat bagi rakyat atau masyarakat, sehingga pemerintahan desa yang dipercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan mendapatkan balasan dalam bentuk kebaikan (Onsardi et al., 2019).

## **2.6 Penelitian Terkait**

I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini (2019), dalam penelitian Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari akuntabilitas transparansi dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten

Badung. Sampel penelitian ini adalah 18 desa di Kecamatan Abiansemal dengan jumlah responden sebanyak 72 orang. Metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas transparansi dan partisipasi masyarakat maka efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung akan semakin baik.

Fitri Sukmawati, Alfi Nurfitriani (2019), Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas, reliabilitas, uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, koefisien determinasi, uji t dan uji F menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solution (SPSS). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel independen dan pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan

akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.

Kartika Restu Aprilya, Astri Fitria (2020), Pengaruh Kompetensi Komitmen Organisasi Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa komitmen organisasi transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gresik. Pengumpulan data dari penelitian ini dengan memanfaatkan data primer yaitu menyebar kuesioner kepada aparatur desa di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS Versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dalam pengelolaan keuangan pemerintah dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan dana. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena seorang yang komit dalam melakukan pekerjaannya maka akan memiliki

tanggungjawab lebih terhadap tugasnya. Transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dengan tidak adanya keterbukaan terhadap informasi pemerintah maka tidak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena masyarakat kurang keterlibatan dalam informasi dari pemerintah.

Eva Julita, Syukriy Abdullah (2020), *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan metode sensus. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang terdiri dari 8 (Delapan) Desa. Data yang digunakan untuk data primer diperoleh secara langsung tanpa perantara oleh peneliti. Data dalam penelitian ini merupakan hasil penyebaran kuesioner dimana peneliti mendistribusikan data untuk penelitian tujuan khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sudah transparan atau belum sepenuhnya dalam mengelola dana desa. Hasil penelitian ini Pemahaman aparat desa terkait Transparansi Pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sudah sangat baik, karena sebagian besar perangkat desa sudah memahami sepenuhnya apa yang telah diatur oleh kebijakan walikota dan sudah memahami isi dari pedoman pengelolaan dana desa. Persepsi masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana

desa secara umum sudah baik, hanya saja persepsi atau pengetahuan masyarakat dalam mengelola dana desa masih kurang. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah aktif. Hal ini terlihat dalam proses perencanaan, masyarakat yang hadir cukup memadai, namun masih kurangnya aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk perencanaan penggunaan dana desa. Begitu juga dalam proses pelaksanaannya, partisipasi masyarakat sudah cukup.

Nanda Sari, Jhon Andra Asmara (2021), Pengaruh Sistem Keuangan Desa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Aceh Tengah). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan kuesioner yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data primer dan skala interval sebagai ukuran. Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah. Sebanyak 90 responden dipilih, terdiri dari Banta, Bendahara, dan Kabag Anggaran. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Variabel independen pada penelitian ini adalah sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah dan transparansi. Selanjutnya variabel dependennya adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk pengujian hipotesis. Pengelolaan data dilakukan menggunakan program SPSS versi 25, dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem keuangan desa, sistem

pengendalian intern pemerintah, dan transparansi berpengaruh simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil parsial penelitian transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Ridha Fajri, Restu Agusti, Julita (2021), penelitiannya tentang Pengaruh Transparansi Partisipasi Masyarakat Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menggunakan metode kuantitatif. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menguji pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Padang Pariaman. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa pada 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa dengan anggaran tertinggi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Responden dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kasi pemerintahan dan kaur perencanaan dan kaur tata usaha dan umum. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, dimana total responden dalam penelitian ini berjumlah 102 responden. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terkait**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini (2019).	Sampel: 18 desa di Kecamatan Abiansema l dengan jumlah responden sebanyak 72 orang Variabel dependen: Efektivitas pengelolaan dana desa Variabel independen : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Metode analisis: Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat maka efektivitas pengelolaan	Variabel dependen: Efektivitas pengelolaan dana desa Variabel independen: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Metode analisis: Regresi Linier Berganda.	Lokasi penelitian: Desa-desa di Kecamatan Abiansema yang berjumlah 18 desa.

**Tabel 2. 1 Lanjutan**

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung akan semakin baik.		
2	Fitri Sukmawati, Alfi Nurfitriani (2019).	Sampel: 30 desa Kabupaten Garut Variabel dependen: Pengelolaan Keuangan Desa variabel independen : Transparansi, Akuntabilitas Metode analisis: Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas	Variabel dependen: Pengelolaan Keuangan Desa variabel independen: Transparansi, Akuntabilitas Metode analisis: Regresi Linier Berganda.	Lokasi penelitian: Kabupaten Garut

**Tabel 2. 1 Lanjutan**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
			berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.		
3	Kartika Restu Aprilya, Astri Fitria (2020).	Sampel: Aparatur desa di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik Variabel dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Variabel independen : Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dalam pengelolaan keuangan pemerintah dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kemampuan	Variabel dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Variabel independen: Transparansi, Partisipasi masyarakat Metode analisis: Regresi Linier Berganda.	Variabel independen: Kompetensi aparatur pengelola dana desa, Komitmen organisasi.

**Tabel 2. 1 Lanjutan**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
		<p>t Metode analisis: Regresi Linier Berganda.</p>	<p>dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan dana. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena seorang yang komit dalam melakukan pekerjaannya maka akan memiliki tanggung jawab lebih terhadap tugasnya. Transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p>		

**Tabel 2. 1 Lanjutan**

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>karena dengan tidak adanya keterbukaan terhadap informasi pemerintah maka tidak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena masyarakat kurang keterlibatan dalam informasi dari pemerintah.</p>		
4	Eva Julita, Syukriy	Sampel: 40 masyarakat	Transparansi Pengelolaan	Variabel dependen: Pengelolaan	Lokasi penelitian: Kecamatan

**Tabel 2. 1 Lanjutan**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	Abdullah (2020).	dari 8 desa Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Variabel dependen: Pengelolaan Dana Desa Variabel independen : Transparansi Metode analisis: Regresi Linier Berganda.	dana desa di wilayah Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sudah sangat baik, karena sebagian besar perangkat desa telah memahami sepenuhnya apa yang telah diatur oleh kebijakan walikota dan telah memahami isi pedoman Pengelolaan Dana Desa. Persepsi masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana desa secara umum sudah baik, hanya saja masyarakat	Dana Desa Variabel independen: Transparansi Metode analisis: Regresi linier berganda.	Sukakarya Kota Sabang.

Tabel 2. 1 Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>masih kurang persepsi atau pengetahuan dalam mengelola dana desa. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah aktif. Hal ini terlihat dari proses perencanaan , masyarakat yang hadir cukup memadai, namun masih minimnya aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk</p>		

**Tabel 2. 1 Lanjutan**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
			merencanakan penggunaan dana desa. Begitu juga dalam proses pelaksanaannya, partisipasi masyarakat sudah cukup.		
5	Ridha Fajri, Restu Agusti, Julita (2021).	Sampel: Seluruh desa di 17 Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman Variabel dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Variabel independen : Transparansi, Partisipasi Masyarakat,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Variabel dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Variabel independen: Transparansi, Partisipasi Masyarakat Metode analisis: Regresi Linear Berganda.	Variabel independen: Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi.

Tabel 2. 1 Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi Metode analisis: Regresi Linear Berganda.			
6	Nanda Sari, Jhon Andra Asmara (2021).	Sampel: 30 desa di Kabupaten Aceh Tengah Variabel dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Variabel independen : Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Transparansi Metode analisis:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah, dan transparansi berpengaruh simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian transparansi parsial tidak berpengaruh	Variabel dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Variabel independen: Transparansi Metode analisis: Regresi Linear Berganda.	Variabel independen: Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

**Tabel 2. 1 Lanjutan**

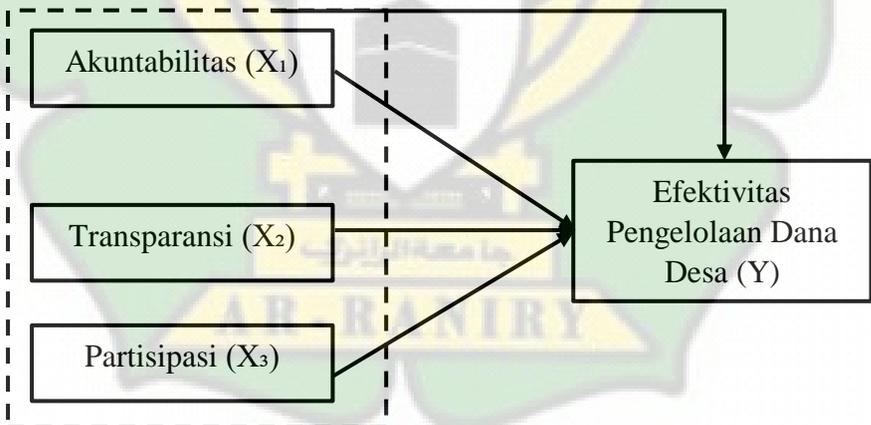
No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Regresi Linear Berganda	terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.		

Sumber: Data Diolah (2022)

### 2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan dalam kajian pustaka diatas, dapat disusun kerangka pemikiran pada gambar 2.1 berikut :

**Gambar 2. 1  
Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data Diolah (2022)

Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## **2.8 Keterkaitan Antar Variabel**

### **2.8.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lieue**

Mustofa (2017) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara berkala. Dalam penelitian Dura (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama juga didapatkan dari penelitian Umami & Nurodin (2020) yang menyatakan terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas dalam pemerintah melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud ialah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya. Dengan adanya akuntabilitas keseluruhan proses penggunaan APBDesa mulai dari usulan perencanaannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

## **2.8.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lieue**

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh suatu pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2018). Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat berhak tahu tentang proses anggaran yang menyangkut kepentingan dana aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa.

Kumalasari (2018) menyatakan bahwa transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Garini dan Ismiarti (2017) bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Ummami dan Nurroddin (2018) menyatakan bahwa implementasi dari prinsip transparansi berpengaruh signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi transparansi maka cenderung semakin baik pula informasi yang didapatkan setiap orang dalam mengetahui keandalan informasi

tersebut. Sukmawati (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

### **2.8.3 Pengaruh Partisipasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lieue**

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Dewi et al., 2018).

Partisipasi masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektifitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Umaira dan Adnan (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ultafiah (2017) yang memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **2.9 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan

kebenarannya melalui data data-data penelitian yang terkumpul (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini terdapat beberapa hipotesis sebagai berikut:

- Ha<sub>1</sub> : Akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue.
- Ho<sub>1</sub> : Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue.
- Ha<sub>2</sub> : Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue.
- Ho<sub>2</sub> : Transparansi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue.
- Ha<sub>3</sub> : Partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue.
- Ho<sub>3</sub> : Partisipasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue.
- Ha<sub>4</sub> : Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berpengaruh secara bersamaan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue.
- Ho<sub>4</sub> : Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang memiliki tujuan menganalisa data secara mendalam. Menurut Sugiyono (2018: 13) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam menganalisis data yang diperoleh dilapangan, peneliti menggunakan *software* seperti SPSS versi 26 dan juga menggunakan *microsoft excel*.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

#### **3.2.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2018) populasi merupakan wilayah generalisasi (sebuah kelompok) yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristi tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan diambil kesimpulan.

Populasi adalah keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang mencakup bidang-bidang untuk di teliti. Populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, kejadian atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti (Malhotra, 1996 dalam Amirullah, 2015). Jadi populasi adalah keseluruhan kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Dari pengertian

tersebut yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa Lieue dan masyarakat setempat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Lieue yang berjumlah 963 jiwa.

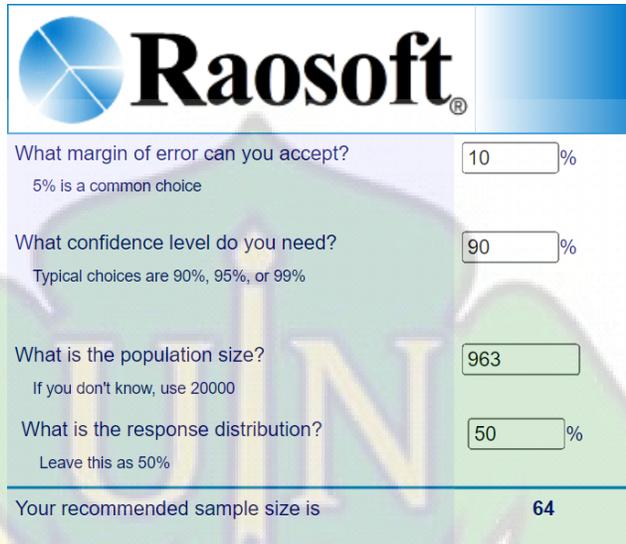
### 3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono, (2017) sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Teknik sampling ialah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Pada penelitian ini teknik sampling digunakan dalam menentukan sampel adalah *probability sampling*. *Probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang akan diteliti. Sampel yang diambil dari populasi haruslah benar-benar valid dan representatif sehingga dapat mengukur sesuatu dengan baik (Sugiyono, 2018).

Penghitungan besar sampel dilakukan dengan menggunakan *sample size calculator* melalui *website www.raosoft.com*. Pada penghitungan sampel, jumlah populasi diisikan pada kolom *population size* dengan *margin of error* 10%, *confidence level* 90%, dan *response distribution* sebesar 50%. Hasil perhitungan sampel dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:

**Gambar 3. 1**  
**Hasil Perhitungan Besaran Sampel Menggunakan Raosoft**



Parameter	Value
What margin of error can you accept? <small>5% is a common choice</small>	10 %
What confidence level do you need? <small>Typical choices are 90%, 95%, or 99%</small>	90 %
What is the population size? <small>If you don't know, use 20000</small>	963
What is the response distribution? <small>Leave this as 50%</small>	50 %
Your recommended sample size is	64

Berdasarkan Gambar 3.1 perhitungan sampel menggunakan *sample size calculator*, hasil sampel yang diperoleh adalah sebesar 64 responden masyarakat Desa Lieue.

### 3.3 Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Sunyoto (2013), Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Metode ini digunakan untuk mengukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat Desa Lieue sebagai responden dalam

penelitian ini. Pada penelitian ini, kuesioner akan dibagikan kepada masyarakat umum, meliputi aparaturnya gampong dan masyarakat biasa.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2010) teknik pengumpulan data merupakan proses mencari, mencatat dan mengumpulkan semua data dari hasil observasi lapangan yang kemudian dicatat berbagai bentuk data yang ditemukan di lapangan. Karena menggunakan data primer, maka dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah menggunakan angket/kuesioner.

#### **3.4.1 Kuesioner**

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan tujuan agar responden memberikan jawaban atau respon dari pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka, jika pilihan jawaban tidak ditentukan sebelumnya, dan bersifat tertutup jika pilihan jawaban telah disertakan sebelumnya, instrumennya dapat berupa: kuesioner (angket), checklist, atau skala (Abdullah, 2015). Bentuk kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner bersifat tertutup berbentuk *skala likert* dengan pilihan jawaban telah disertakan sebelumnya. Responden tinggal memilih pilihan jawaban yang telah disediakan dalam kuesioner, dengan ini akan memudahkan peneliti saat mengolah hasil angket.

*Skala likert* digunakan sebagai skala pengukuran oleh peneliti untuk menerangkan tanggapan dari para responden terhadap pertanyaan yang diberikan. Menurut Abdullah (2015) *Skala Likert* merupakan skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon pernyataan berkaitan dengan indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur. Adapun urutan skala pengukuran dimulai dari (sangat setuju) - (sangat tidak setuju) untuk semua variabel, dengan skor atau nilai dari setiap pertanyaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Skala Penilaian Jawaban Angket (*Skala Likert*)**

<b>Alternative Jawaban</b>	<b>Kode</b>	<b>Skor/Nilai</b>
Sangat Setuju	ST	5
Setuju	S	4
Cukup Setuju	CS	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber : Sugiyono (2018)

### **3.5 Devinisi dan Operasionalisasi Variabel**

Operasional variabel merupakan sebuah atribut, sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti yang selanjutnya akan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang memiliki keterkaitan dalam penelitian, operasionalisasi sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Tujuan dari operasionalisasi variabel untuk memberikan kredibilitas pada metodologi dan sebagai penentuan skala

pengukuran dari tiap-tiap variabel. Sehingga hasil uji hipotesis dengan pemakaian alat bantu dapat terlaksana dengan baik. pada penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel independen (X) dan dependen (Y).

### **3.5.1 Akuntabilitas $X_1$**

Menurut Ayu Komang (2017) akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja dari pemimpin atau pejabat suatu lembaga organisasi kepada pihak yang telah memberi jabatan atau yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Adapun indikator akuntabilitas ialah:

1. Terdapat kesesuaian antara pelaksanaan terhadap standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya dokumen laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah secara tertulis.
3. Keputusan yang telah dibuat harus memenuhi standar etika yang berlaku.
4. Konsisten terhadap target operasional yang telah ditetapkan.
5. Pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap setiap dana desa yang telah dikelola.

### **3.5.2 Transparansi $X_2$**

Menurut Putra Darma & Rasmini (2019) Tranparansi dimaknai sebagai bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi

yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dana desa.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi pemerintah desa.
3. Keterbukaan dalam pengelolaan dana desa.
4. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang sudah dicapai oleh pemerintah.

### **3.5.3 Partisipasi X<sub>3</sub>**

Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang (Efrizal, 2013).

Menurut Rasmini (2019) indikator partisipasi yaitu:

1. Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses
3. Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

### **3.5.4 Pengelolaan Dana Desa Y**

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 ialah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa (Boedijono et al., 2019). Indikator pengelolaan dana desa yaitu:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa.
2. Peningkatan kegiatan keagamaan.
3. Pembangunan sarana dan prasarana desa.
4. Membangun gedung pendidikan.
5. Rehabilitas rumah tidak layak huni.

**Tabel 3. 2**  
**Devinisi dan Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Devinisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Akuntabilitas (X1)	Pertanggungjawaban dari pemerintah kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejujuran dan keterbukaan informasi</li> <li>• Kepatuhan dalam pelaporan</li> <li>• Kesesuaian prodesur</li> <li>• Kecukupan informasi</li> <li>• Ketepatan penyampaian laporan</li> </ul> <p>(Ayu Komang dalam Nufidah dan Anisa, 2017)</p>	<i>Likert</i>
2	Transparansi (X2)	Keterbukaan atau keterusterangan pemerintah dalam memberikan informasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen</li> <li>• Kejelasan dan kelengkapan</li> </ul>	<i>Likert</i>

**Tabel 3. 3 Lanjutan**

No	Variabel	Devinisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
			<p>informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbukaan</li> <li>• Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang sudah dicapai.</li> </ul> <p>(Putra Darma &amp; Rasmini, 2019).</p>	
3	Partisipasi (X3)	Keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat</li> <li>• Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses</li> <li>• Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses</li> </ul>	<i>Likert</i>

**Tabel 3. 3 Lanjutan**

No	Variabel	Devinisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
			pengambilan keputusan.  (Efrizal, 2013) (Rasmini, 2019)	
4	Pengelolaan Dana Desa (Y)	Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa.</li> <li>• Peningkatan kegiatan keagamaan.</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana desa.</li> <li>• Membangun gedung pendidikan.</li> <li>• Rehabilitasi rumah tidak layak huni.</li> </ul> (Boedijono et al., 2019).	<i>Likert</i>

Sumber : Data Diolah (2022)

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1 Uji Validitas**

Menurut Sugiyono (2017: 125) uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi pada objek

dengan data yang didapatkan oleh peneliti. Uji validitas merupakan untuk mendefinisikan sejauh mana data yang diperoleh melalui instrumen penelitian (dalam penelitian ini kuesioner) akan mengukur apa yang ingin diukur. Oleh sebab itu data yang valid adalah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi dilapangan. Standar penilaian uji validitas yang memenuhi syarat yaitu:

- a. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, maka komponen kuesioner dianggap valid.
- b. Jika  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel, maka komponen kuesioner dianggap tidak valid.

### **3.6.2 Uji Reabilitas**

Reliabilitas berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran memiliki keterpercayaan, konsistensi, kestabilan yang dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya jika dalam beberapakali pengukuran kepada kelompok subjek yang sama ditemukan hasil yang relatif sama (Azwar, 2011). Standar penilaian uji reabilitas yang memenuhi syarat yaitu:

- a. Jika perolehan koefisien *alpha Cronbach* lebih besar dari 0,60 maka kuesioner tersebut dianggap reliabel.
- b. Jika perolehan koefisien *alpha cronbach* lebih kecil dari 0,60 maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliabel.

### **3.7 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik adalah tahap yang penting pada analisis regresi. Kegunaan dari uji asumsi klasik adalah untuk melengkapi uji statistik yang sudah dilaksanakan yakni uji t dan uji f. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kualitas data agar diketahui validitas datanya dan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yakni, uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

#### **3.7.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan (Sunyoto, 2016). Persamaan regresi dikatakan baik apabila mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak pada model regresi linear, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik ialah model regresi yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan Test Normality *Kolmogorov-Smirnov*, Singgih Santosa (2012) standar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significant*ed), yakni:

- a. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi dari model regresi ialah normal.
- b. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi dari model regresi ialah tidak normal.

### 3.7.2 Uji Multikolinieritas

Tujuan uji multikolinieritas untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jika antar variabel independen terjadi multikolinieritas sempurna, maka koefisien regresi variabel independen tidak dapat ditentukan dan nilai *standard error* menjadi tidak terhingga. Jika multikolinieritas antar variabel independen tinggi, maka koefisien regresi variabel independen dapat ditentukan, tetapi mempunyai nilai *standard error* tinggi berarti nilai koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan tepat (Ghozali, 2016).

Cara mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas pada model regresi sebagai berikut:

- a. Jika  $R^2$  yang diperoleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (diatas 0,90), maka mengindikasikan terdapat multikolinieritas. Tidak terdapat korelasi yang tinggi antar

variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat diakibatkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

c. Jika berdasarkan pada nilai *Tolerance value* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) terlihat bahwa tidak ada nilai *Tolerance* di bawah 0,10 begitupula dengan nilai VIF tidak ada yang di atas 10. Dengan menggunakan parameter ini, tidak terbukti adanya multikolinieritas yang serius. Berikut pengujian multikolinearitas:

- *Tolerance value* < 0,10 atau VIF > 10 : maka terjadi multikolinearitas.
- *Tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 : maka tidak terjadi multikolinearitas.

### 3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika residualnya memiliki *variance* kesamaan maka terjadi homoskedastisitas dan jika variannya tidak memiliki kesamaan maka terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018; 137).

Adapun cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas < 0,05  $H_0$  diterima, maka terdapat heteroskedastisitas.

- b. Jika nilai probabilitas  $> 0,05$   $H_0$  ditolak maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

### 3.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas/*response* (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas/*predictor* ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ). Uji regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi nilai variabel tak bebas/*response* (Y) jika nilai-nilai variabel bebasnya/*predictor* ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) diketahui. Disamping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimana arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya (Yuliara, 2016).

Dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda karena variabel bebas pada penelitian lebih dari satu. Menurut Sugiyono (2016) analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan seperti berikut ini:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e \quad (3.1)$$

Keterangan :

- Y = Pengelolaan Dana Desa  
 $X_1$  = Akuntabilitas  
 $X_2$  = Transparansi  
 $X_3$  = Partisipasi  
a = Konstanta  
 $b_{1,2,3}$  = Koefisien regresi variabel independen  
e = Nilai Error/Variabel Pengganggu

### **3.9 Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tiga tes. Yang pertama adalah uji-t yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) secara parsial terhadap variabel terikat (dependen). Berikutnya yang kedua adalah uji-f yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (independen) satu sama lain terhadap variabel terikat (dependen). Terakhir Uji koefisien Determinasi ( $R^2$ ) untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Model pengujiannya ialah:

#### **3.9.1 Uji Parsial (Uji T)**

Menurut Ghozali (2016), Uji-T adalah uji yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas berdasarkan individual dalam menjelaskan variabel terikat (dependen). Tolak ukur pengambilan keputusan dalam penelitian ini menggunakan uji-T yang dilakukan dengan menggunakan SPSS dengan taraf signifikansi 0,05. Jika T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dikatakan signifikan. Oleh karena itu, jika T hitung  $<$  T tabel sig.  $<$  0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Begitu juga jika T hitung  $>$  T tabel atau sig.  $>$  0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kriteria pengujian dilakukan sebagai berikut:

- a. Jika nilai  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel dan nilai  $\text{Sig} < \alpha$  (5%) maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel X berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Y.
- b. Jika nilai  $t$ -hitung  $<$   $t$ -tabel nilai  $\text{Sig} > \alpha$  (5%) maka  $H_0$  diterima, artinya variabel X tidak berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Y.

### 3.9.2 Uji Simultan ( Uji F)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk menguji apakah pengaruh variabel bebas (independen) dengan cara bersamaan (simultan) mempengaruhi variabel terikat (dependen). Dengan menggunakan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 5%.  $H_0$  diterima jika  $\text{Sig. F} > 0,05$  yang berarti tidak ada pengaruh bersamaan (simultan) antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue. Sebaliknya jika  $H_a$  diterima jika  $\text{Sig. F} < 0,05$  maka memiliki pengaruh yang bersamaan (simultan) antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue. Standar untuk lulus uji F adalah:

- a. Jika nilai F hitung  $>$  F tabel atau  $\text{sig.} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya semua variabel bebas (independen) berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (dependen).
- b. Jika nilai F hitung  $<$  F tabel atau  $\text{sig.} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya semua variabel bebas (independen)

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) (Ghozali, 2016).

### **3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )**

Uji koefisien Determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Koefisien determinasi  $R^2$  pada dasarnya mengukur seberapa baik model dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai  $R^2$  mendekati 1 menunjukkan bahwa hasil model regresi baik atau variabel bebas (independen) secara umum dapat menjelaskan variabel terikat (dependen). Sedangkan jika nilai  $R^2$  mendekati 0, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016).

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Desa Lieue merupakan sebuah desa yang terletak di kemukiman Siem yang terdiri dari 8 desa. Desa Lieue terbagi menjadi empat bagian yang disebut dengan dusun/jurong, yaitu Dusun Lampaseh, dusun Teungku Dilieue, dusun Tengku Dijurong dan Dusun Mon Bluko. Penghasilan sebagian besar masyarakat lieue adalah hasil dari pertanian, pedagang, wiraswasta, buruh dan terdapat juga masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Lieue dapat dilihat berdasarkan dusun/jurong dan jumlah penduduk disetiap dusun/jurong pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4. 1  
Jumlah Penduduk Disetiap Dusun/Jurong Desa Lieue**

<b>No</b>	<b>Dusun/Jurong</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1	Dusun Lampaseh	296 Orang
2	Dusun Tengku Dilieue	240 Orang
3	Dusun Tengku Dijurong	260 Orang
4	Dusun Mon Bluko	167 Orang

Sumber: RPJM Desa Lieue, 2019-2025

Berdasarkan Tabel 4.1 jumlah penduduk terbanyak terdapat didusun Lampaseh sebanyak 296 penduduk, diikuti oleh dusun

Tengku Dijurong sebanyak 260 orang, Dusun Tengku Dilieue 240 orang dan dusun Mon Bluko sebanyak 167 orang.

Luas wilayah desa Lieue  $\pm 4 \text{ Km}^2$  yang terdiri kawasan perumahan warga, persawahan, tempat ibadah, sarana umum dan lain sebagainya. Keadaan geografis desa lieue merupakan dataran rendah yang tidak berbukit dengan sebagian besar lahan terdiri dari persawahan dan lahan kebun masyarakat. Adapun perbatasan wilayah desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lambiheu Siem
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lam Bitra
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan area persawahan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lamklat

Mengenai jarak antara desa Lieue dengan pusat Kota atau Kecamatan adalah mencapai jarak 3,5 Kilometer dengan lama waktu tempuh mencapai 10 menit, jarak tempuh ke pusat Kabupaten dari desa lieue mencapai 50 Kilometer dengan lama waktu tempuh mencapai 60 menit.

Berdasarkan kategori usia jumlah penduduk Desa Lieue tahun 2022, pada usia 0-14 tahun berjumlah 328 orang, usia 15-64 berjumlah 569 orang dan pada usia 65 tahun keatas berjumlah 66 orang. Jadi total keseluruhan masyarakat Desa Lieue pada tahun 2022 berjumlah 963 orang. Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Jumlah Penduduk Desa Lieue Berdasarkan Usia Tahun 2022**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>
0-14 tahun	328 Orang
15-64 tahun	569 Orang
65 tahun keatas	66 Orang
<b>Total</b>	<b>963 Orang</b>

Sumber: RPJM Desa Lieue, 2019-2025

#### **4.1.1 Kondisi Ekonomi**

Perekonomian Desa Lieue didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang, wiraswasta buruh dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan cenderung homogen, artinya warga memperoleh mata pencaharian yang sama. Dengan demikian, kerjasama antar masyarakat desa terjalin lebih erat. Karena mata pencaharian mereka biasanya sama. Dengan potensi tersebut ternyata belum sepenuhnya dapat memenuhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingginya harga-harga komoditi dipasaran tidak dibarengi dengan pendapatan yang cukup bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, perlu peran penting pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk usaha-usaha maupun memberikan langsung dalam bentuk modal usaha sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengadakan pelatihan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat Desa Lieue.

#### 4.1.2 Kondisi Demografi Desa Lieue

##### a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan pendataan penduduk tahun 2022 jumlah penduduk desa Lieue saat ini adalah sebanyak 287 KK (Kepala Keluarga) dengan total keseluruhan penduduk berjumlah 963 jiwa yang terdiri dari 439 penduduk laki-laki dan 524 penduduk perempuan dengan kategori usia 0-65 tahun keatas. Untuk lebih terperinci mengenai masyarakat desa Lieue dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	524 orang
2	Perempuan	439 orang
<b>Total</b>		<b>963</b>

Sumber: RPJM Desa Lieue, 2019-2025

##### b. Profesi dan Pekerjaan

Berdasarkan profesi dan pekerjaan, masyarakat Desa Lieue di sebagian besar berprofesi sebagai wiraswasta, petani, pedagang, dan PNS. Untuk data yang lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Profesi Dan Pekerjaan Kepala Keluarga Desa Lieue**

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh	9 Orang
2.	Dosen	5 Orang
3.	Guru	2 Orang
4.	Karyawan honorer	4 Orang

<b>No</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
5.	Karyawan swasta	5 Orang
6.	TNI/POLRI	1 Orang
7.	Nelayan/perikanan	1 Orang
8.	Pedagang	19 Orang
9.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19 Orang
10.	Petani/pekebun	25 Orang
11.	Seniman	1 Orang
12.	Sopir	5 Orang
13.	Tukang batu	5 Orang
14.	Tukang kayu	2 Orang
15.	Wiraswasta	45 Orang
16.	Lainnya	40 Orang
<b>Total</b>		<b>188 Orang</b>

Sumber: RPJM Desa Lieue, 2019-2025

Berdasarkan Tabel 4.4 jenis pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Desa Lieue adalah wiraswasta dengan jumlah 45 orang dari total keseluruhan 188 orang. Dan ada beberapa pekerjaan yang paling sedikit digeluti oleh masyarakat Desa Lieue diantaranya TNI/POLRI, nelayan dan seniman yang berjumlah 1 orang. Dengan demikian dapat diberi kesimpulan bahwa mayoritas pekerjaan dari masyarakat Desa Lieue adalah sebagai wiraswasta. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Lieue cenderung melakukan pekerjaan secara mandiri dan tidak terikan oleh adanya atasan dalam melakukan pekerjaan.

## 4.2 Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh *keuchik* dan *tuha peut* desa. Adapun rincian anggaran dana desa yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4. 5**  
**APBDesa Desa Lieue Tahun 2021**

No	Alokasi Dana	Jumlah
1	Pendapatan Desa	Rp1.064.466.846
2	Belanja Desa	Rp1.064.462.320
3	Surplus/Defisit	Rp4.526

Sumber: APBDesa Desa Lieue Tahun 2021

Dari Tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) 2021, disebutkan bahwa jumlah pendapatan Desa berjumlah Rp. 1.064.466.846 yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapan Asli Gampong (PAG), dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi. Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) 2021 disebutkan belanja Desa berjumlah Rp. 1.064.462.320. Dan pada tabel tersebut juga dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) 2021 mengalami surplus berjumlah Rp. 4.526.

## 4.3 Karakteristik Responden

Pada bagian ini data responden penelitian merupakan sampel dari 64 orang masyarakat Desa Lieue dengan karakteristik

responden diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, pengalaman menjadi perangkat gampong.

#### 4.3.1 Usia

Hasil pengolahan data primer hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, peneliti mengelompokkan responden berdasarkan usia dengan menempatkannya sesuai dengan rentang usia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:

**Gambar 4. 1**  
**Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**



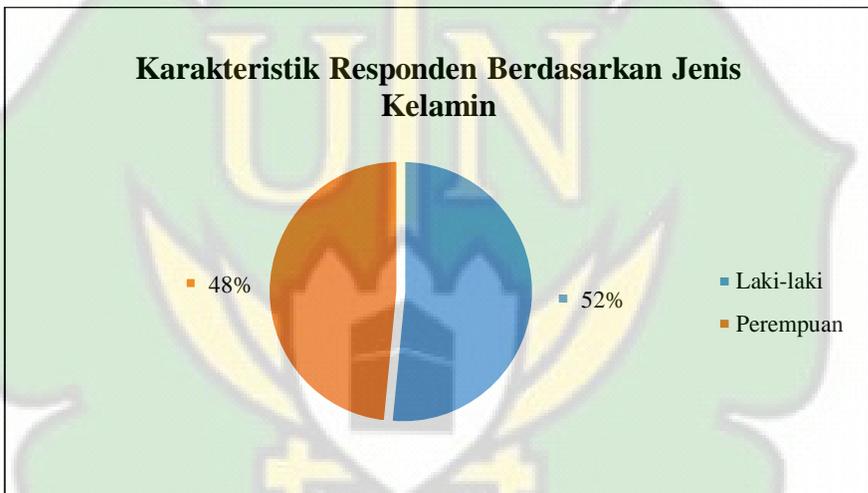
Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan Gambar 4.1 bahwa dari 64 responden yang mengisi kuesioner mayoritas diisi oleh masyarakat yang berusia 44-54 tahun dengan jumlah 50%. Selanjutnya diikuti oleh usia 22-32 tahun berjumlah 23%, usia 55-65 tahun sebanyak 13%, usia 33-43 sebanyak 9% dan usia 66 keatas sebanyak 5%.

### 4.3.2 Jenis Kelamin

Pada pengolahan data primer hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan mengelompokkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut:

**Gambar 4. 2**  
**Grafik Presentase Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2022

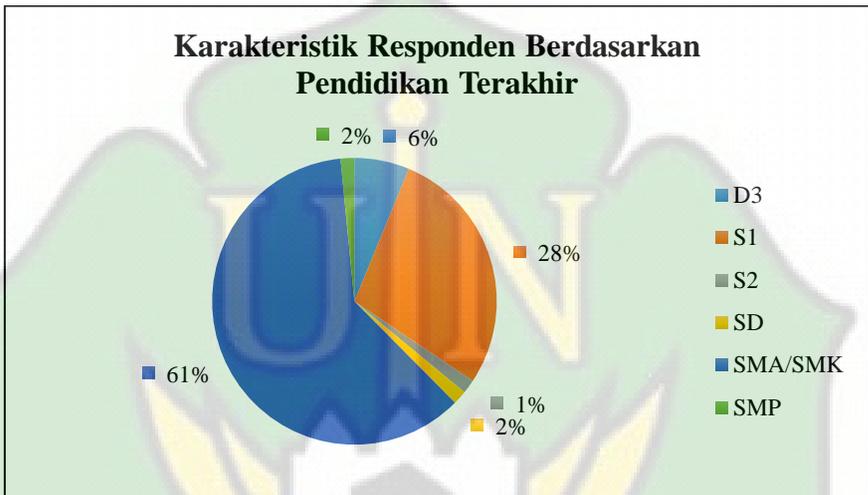
Berdasarkan Gambar 4.2 bahwa terdapat 52% responden berjenis kelamin laki-laki dan 48% responden berjenis kelamin perempuan yang mengisi kuesioner penelitian ini. Dengan total keseluruhan antara laki-laki dan perempuan berjumlah 64 responden.

### 4.3.3 Pendidikan Terakhir

Pada pengolahan data primer hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti mengelompokkan responden berdasarkan

pendidikan terakhir yakni: SD, SMP, SMA/SMK, D3, S1, S2 dan S3. Untuk rincian lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut:

**Gambar 4.3**  
**Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan Gambar 4.3 bahwa responden paling menonjol dalam mengisi kuesioner adalah responden yang menempuh pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) dengan jumlah persentase responden sebanyak 61%.

#### **4.3.4 Pekerjaan**

Pada pengolahan data primer hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti mengelompokkan responden berdasarkan pekerjaan yakni: Buruh, Mengurus Rumah Tangga, Pedagang, Petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Wiraswasta dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut:

**Gambar 4. 4**  
**Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan Gambar 4.4 bahwa terdapat 22% responden berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 20% responden yang berprofesi sebagai petani, 19% responden berprofesi sebagai Buruh, 16% responden Mengurus Rumah Tangga, 12% responden berprofesi sebagai Wiraswasta dan 11% responden yang berprofesi sebagai Pedagang.

#### **4.3.5 Pengalaman Menjadi Perangkat Desa**

Pada pengolahan data primer hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti mengelompokkan responden berdasarkan pengalaman menjadi perangkat desa dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut:

**Gambar 4. 5**  
**Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan**  
**Pengalaman Menjadi Perangkat Gampong**



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan Gambar 4.5 bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini didominasi oleh masyarakat yang tidak pernah menjadi perangkat desa yaitu dengan persentase sebesar 75%.

#### 4.4 Deskriptif Statistik

##### 1. Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Akuntabilitas (X<sub>1</sub>)

Hasil tanggapan responden terhadap variabel akuntabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Tanggapan Responden Terhadap Akuntabilitas (X<sub>1</sub>)**

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS	Modus
1.	Pemerintah desa mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kepada umum.	7	32	22	3	0	4
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan baik.	7	31	15	9	2	4
3.	Pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan jujur serta terhindar dari penyalahgunaan jabatan.	16	24	16	8	0	4
4.	Masyarakat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa.	8	24	26	5	1	3
5.	Pemerintah desa memberikan pelayanan yang	9	26	17	12	0	4

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS	Modus
	memuaskan kepada masyarakat.						
Modus							4

Sumber: Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa responden memilih jawaban setuju untuk pernyataan akuntabilitas karena memiliki jawaban responden yang sering muncul adalah 4.

## 2. Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Transparansi ( $X_2$ )

Hasil tanggapan responden terhadap variabel transparansi dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Tanggapan Responden Terhadap Transparansi ( $X_2$ )**

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS	Modus
1.	Pemerintah terbuka dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa yang jujur dan benar.	16	27	20	1	0	4
2.	Kemudahan untuk mengakses dokumen tentang anggaran dana desa.	14	26	22	2	0	4
3.	Pemerintah desa selalu menyampaikan informasi tentang	34	22	5	1	2	5

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS	Modus
	capaian dari program dana desa yang telah ditargetkan.						
4.	Dana desa selalu diinformasikan melalui pembuatan spanduk/baliho.	26	28	9	1	0	4
Modus							4

Sumber: Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa responden memilih jawaban setuju untuk pernyataan transparansi karena memiliki jawaban responden yang sering muncul adalah 4.

### 3. Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi (X<sub>3</sub>)

Hasil tanggapan responden terhadap variabel partisipasi dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi (X<sub>3</sub>)**

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS	Modus
1.	Masyarakat terlibat langsung dalam proses penyusunan program-program pengelolaan dana desa.	3	33	24	4	0	4
2.	Masyarakat aktif pada saat pelaksanaan rapat-rapat proses pengambilan keputusan.	3	35	17	9	0	4
3.	Masyarakat bebas menyampaikan aspirasi,	18	25	19	2	0	4

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS	Modus
	saran ataupun kritikan terhadap pengelola dana desa.						
Modus							4

Sumber: Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa responden memilih jawaban setuju untuk pernyataan partisipasi karena memiliki jawaban responden yang sering muncul adalah 4.

#### 4. Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Hasil tanggapan responden terhadap variabel efektivitas pengelolaan dana desa dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)**

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS	Modus
1.	Sumber daya yang digunakan untuk mengelola dana desa dimanfaatkan secara baik dan tepat.	13	30	18	3	0	4
2.	Pengelolaan dana desa dilaksanakan secara ekonomis, menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.	20	26	17	1	0	4
3.	Dana desa disalurkan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.	23	26	14	1	0	4

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS	Modus
4.	Penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.	19	23	19	3	0	4
5.	Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan syariat islam yang berlaku.	29	26	8	1	0	5
Modus							4

Sumber: Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa responden memilih jawaban setuju untuk pernyataan efektivitas pengelolaan dana desa karena memiliki jawaban responden yang sering muncul adalah 4.

## 4.5 Uji Validitas dan Reabilitas

### 4.5.1 Uji Validitas

Uji validitas memiliki tujuan untuk mengetahui kesesuaian angket atau kuesioner yang digunakan oleh peneliti pada proses pengumpulan data dari para responden atau sampel penelitian. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel, dimana jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka butir pertanyaan disetiap kuesioner tersebut valid, sedangkan jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka dinyatakan tidak valid.

Uji validitas dapat dihitung dengan cara melakukan perbandingan antara  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$ . Dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel atau

responden. Jadi pada penelitian ini,  $df = 64-2$  atau  $df = 62$  dengan nilai alpha 0,05 dan nilai  $r$  tabel = 0,254. Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Item Pertanyaan	r tabel	r hitung	Keterangan
1	Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,254	0,795	Valid
		X1.2	0,254	0,871	Valid
		X1.3	0,254	0,847	Valid
		X1.4	0,254	0,852	Valid
		X1.5	0,254	0,806	Valid
2	Transparansi (X2)	X2.1	0,254	0,797	Valid
		X2.2	0,254	0,749	Valid
		X2.3	0,254	0,770	Valid
		X2.4	0,254	0,808	Valid
3	Partisipasi (X3)	X3.1	0,254	0,789	Valid
		X3.2	0,254	0,838	Valid
		X3.3	0,254	0,822	Valid
4	Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y1	0,254	0,782	Valid
		Y2	0,254	0,879	Valid
		Y3	0,254	0,827	Valid
		Y4	0,254	0,855	Valid
		Y5	0,254	0,736	Valid

Sumber: Pengolahan Data Primer oleh SPSS (2022)

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa tiap-tiap item pertanyaan memiliki nilai  $r$  hitung lebih besar dari nilai  $r$  tabel 0,254. Jadi dapat disimpulkan dari semua indikator variabel independen  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan variabel dependen  $Y$  dinyatakan valid.

#### 4.5.2 Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi dari suatu angket atau kuesioner dalam penelitian sebagai alat pengumpulan data, sehingga angket tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian meskipun penelitian dilakukan berulang-ulang dengan angket atau kuesioner yang sama. Item kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *alpha cronbach's* > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika nilai *alpha cronbach's* < 0,60. Adapun hasil uji reabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

**Tabel 4. 11**  
**Hasil Uji Reabilitas**

No	Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Minimal <i>Alpha Cronbach's</i>	Keterangan
1.	Akuntabilitas (X1)	0,890	0,60	Reliabel
2.	Transparansi (X2)	0,782	0,60	Reliabel
3.	Partisipasi (X3)	0,747	0,60	Reliabel
4.	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,875	0,60	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data Primer oleh SPSS (2022)

Berdasarkan hasil uji reabilitas pada Tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap variabel memiliki nilai *alpha cronbach's* lebih besar dari 0,60. Dengan demikian menunjukkan bahwa semua item variabel dinyatakan reliabel.

## 4.6 Uji Asumsi Klasik

### 4.6.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan suatu uji yang dilakukan bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan Test Normality *Kolmogorov-Smirnov*. Jika hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai sig. > 0,05 maka data yang diuji dapat dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai sig. < 0,05 maka data yang diuji tidak berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut:

**Tabel 4. 12**  
**Hasil Uji Normalitas**

		<b>Unstandardized Residual</b>
N		64
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.89798349
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.046
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Pengolahan Data Primer oleh SPSS (2022)

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa hasil dari uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200, dan nilai signifikansi tersebut lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### **4.6.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen (bebas). Adapun cara mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas pada model regresi sebagai berikut:

Jika berdasarkan pada nilai *Tolerance value* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) terlihat bahwa tidak ada nilai *Tolerance* di bawah 0,10 begitupula dengan nilai VIF tidak ada yang di atas 10. Dengan menggunakan parameter ini, tidak terbukti adanya multikolinieritas yang serius.

- a.  $Tolerance\ value < 0,10$  atau  $VIF > 10$  : maka terjadi multikolinearitas.
- b.  $Tolerance\ value > 0,10$  atau  $VIF < 10$  : maka tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 4. 13**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1.743	1.793		.972	.335		
	Akuntabilitas	.225	.087	.265	2.581	.012	.521	1.919
	Transparansi	.344	.119	.266	2.900	.005	.650	1.538
	Partisipasi	.794	.159	.456	4.994	.000	.657	1.523

a. Dependent Variable: Efektifitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Pengolahan Data Primer oleh SPSS (2022)

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* variabel  $X_1$  (akuntabilitas) = 0,521,  $X_2$  (transparansi) = 0,650 dan  $X_3$  (partisipasi) = 0,657. Ketiga variabel independen tersebut memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak terjadinya multikolinearitas. Jika dilihat berdasarkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), semua nilai VIF pada variabel independen menunjukkan hasil lebih besar dari 10 dengan nilai VIF variabel  $X_1$  (akuntabilitas) = 1,919,  $X_2$  (transparansi) = 1,538, dan  $X_3$  (partisipasi) = 1,523. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika residualnya memiliki varian kesamaan maka terjadi homoskedastisitas dan jika variannya tidak memiliki kesamaan maka terjadi heteroskedastisitas.

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018; 137). Metode yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah metode Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolute residual (e) hasil regresi dengan semua variabel bebas, dengan standar pengukurannya sebagai berikut:

- a. Apabila nilai probabilitas hasil korelasi  $< 0,05$ , maka persamaan regresi tersebut terdapat heteroskedastisitas.
- b. Apabila nilai probabilitas hasil korelasi  $> 0,05$ , maka persamaan regresi tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas.

**Tabel 4. 14**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Rank Spearman**

			Aku nta bilit as	Tran sp ara nsi	Par tisip asi	Unstand ardized Residual
Spear man's rho	Akuntab ilitas	Correlation Coefficient	1.00 0	.539 **	.494 **	.206
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.103
		N	64	64	64	64
	Transpar ansi	Correlation Coefficient	.539 **	1.00 0	.383 **	.137
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.002	.282
		N	64	64	64	64
	Partisipa si	Correlation Coefficient	.494 **	.383 **	1.00 0	.156
		Sig. (2-tailed)	.000	.002	.	.218
		N	64	64	64	64
	Unstand ardized Residual	Correlation Coefficient	.206	.137	.156	1.000
		Sig. (2-tailed)	.103	.282	.218	.
		N	64	64	64	64

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Pengolahan Data Primer oleh SPSS (2022)

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas hasil korelasi variabel  $X_1$  (akuntabilitas) sebesar  $0,103 > 0,05$ ,  $X_2$  (transparansi) sebesar  $0,282 > 0,05$ , dan  $X_3$  (partisipasi) sebesar  $0,218 > 0,05$ . Semua variabel menunjukkan nilai probabilitas hasil korelasi lebih besar dari  $0,05$ , Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi nilai variable tak bebas/*response* (Y) jika nilai-nilai variabel bebasnya/*predictor* ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) diketahui. Disamping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimana arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah pengelolaan dana desa. Untuk melakukan uji regresi linier berganda maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Adapun persamaan umum dari regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut:

**Tabel 4. 15**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.743	1.793		.972	.335
	Akuntabilitas	.225	.087	.265	2.581	.012
	Transparansi	.344	.119	.266	2.900	.005
	Partisipasi	.794	.159	.456	4.994	.000

a. Dependent Variable: Efektifitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Pengolahan Data Primer oleh SPSS (2022)

Berdasarkan Tabel 4. 15 dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data menggunakan program SPSS diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad (4. 1)$$

$$Y = 1,743 + 0,225 X_1 + 0,344 X_2 + 0,794 X_3 + e \quad (4. 2)$$

Berdasarkan tabel 4. 12 besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut:

Interpretasi:

- a. Nilai konstanta (a) yang diperoleh sebesar 1,743 berarti jika nilai koefisien regresi variabel  $X_1$  (akuntabilitas),  $X_2$  (transparansi),  $X_3$  (partisipasi) tidak bertambah maka nilai koefisien regresi variabel Y (efektifitas pengelolaan dana desa) sebesar 1,743.
- b. Nilai koefisien regresi  $X_1$  (akuntabilitas) sebesar 0,225 berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan dana desa (Y). Hal ini berarti jika setiap terjadi peningkatan akuntabilitas ( $X_1$ ) sebesar 1 satuan, maka efektifitas pengelolaan dana desa (Y) juga akan meningkat sebesar 0,225 (22,5%).
- c. Nilai koefisien regresi  $X_2$  (transparansi) sebesar 0,344 berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan dana desa (Y). Hal ini berarti jika setiap terjadi peningkatan transparansi ( $X_2$ ) sebesar 1 satuan, maka efektifitas pengelolaan dana desa (Y) juga akan meningkat sebesar 0,344 (34,4%).

d. Nilai koefisien regresi  $X_3$  (partisipasi) sebesar 0,794 berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan dana desa(Y). Hal ini berarti jika setiap terjadi peningkatan partisipasi ( $X_3$ ) sebesar 1 satuan, maka efektifitas pengelolaan dana desa (Y) juga akan meningkat sebesar 0,794 (79,4%).

## **4.8 Pengujian Hipotesis**

### **4.8.1 Uji Parsial (Uji T)**

Uji parsial adalah uji yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas berdasarkan individual dalam menjelaskan variabel terikat (dependen). Uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel dengan derajat kebebasan ( $df = n-k$ ). Pada hal ini n adalah jumlah sampel. Jadi dalam penelitian ini  $df = 64-4$  atau  $df = 60$  dengan alpha 5% sehingga t tabel = 2,000. Adapun ketentuan dalam pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitung  $>$  t-tabel atau nilai Sig  $<$  0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima berarti variabel independen dapat menerangkan variabel dependen secara parsial (individual).
- b. Jika nilai t hitung  $<$  t-tabel nilai Sig  $>$  0,05 maka  $H_0$  diterima  $H_a$  diterima berarti variabel independen tidak dapat menerangkan variabel dependen secara parsial (individual).

**Tabel 4. 16**  
**Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.743	1.793		.972	.335
	Akuntabilitas	.225	.087	.265	2.581	.012
	Transparansi	.344	.119	.266	2.900	.005
	Partisipasi	.794	.159	.456	4.994	.000

a. Dependent Variable: Efektifitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Pengolahan Data Primer oleh SPSS (2022)

1. Pengaruh akuntabilitas ( $X_1$ ) terhadap efektifitas pengelolaan dana desa (Y)

Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui nilai t hitung akuntabilitas sebesar 2,581 dan t tabel sebesar 2,000 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,581 > 2,000$ ) dengan nilai signifikan akuntabilitas  $0,012 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) berpengaruh secara parsial terhadap efektifitas pengelolaan dana desa (Y).

2. Pengaruh transparansi ( $X_2$ ) terhadap efektifitas pengelolaan dana desa (Y)

Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui nilai t hitung transparansi sebesar 2,900 dan t tabel sebesar 2,000 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,900 > 2,000$ ) dengan nilai signifikan transparansi  $0,005 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima,

artinya variabel transparansi ( $X_2$ ) berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Y).

3. Pengaruh partisipasi ( $X_3$ ) terhadap efektifitas pengelolaan dana desa (Y)

Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui nilai t hitung partisipasi sebesar 4,994 dan t tabel sebesar 2,000 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel ( $4,994 > 2,000$ ) dengan nilai signifikan partisipasi  $0,000 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel partisipasi ( $X_3$ ) berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Y).

#### 4.8.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk menguji apakah pengaruh variabel bebas (independen) dengan cara bersamaan mempengaruhi variabel terikat (dependen). Standar untuk lulus uji F adalah:

- a. Jika nilai F hitung  $> F$  tabel atau sig.  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang demikian menunjukkan bahwa semua variabel bebas (independen) berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (dependen).
- b. Jika nilai F hitung  $< F$  tabel atau sig.  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, Hal ini menyatakan bahwa semua variabel bebas (independen) tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (dependen).

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (independen) dan terikat (dependen) secara simultan (bersamaan)

sehingga hipotesis kedua dapat dirumuskan dalam uraian kalimat berikut ini:

$H_0$  = Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue.

$H_a$  = Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue.

Dengan menggunakan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 5%.  $H_0$  diterima jika  $\text{Sig. } F > 0,05$  yang berarti tidak ada pengaruh bersamaan (simultan) antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue. Sebaliknya jika  $H_a$  diterima jika  $\text{Sig. } F < 0,05$  maka memiliki pengaruh yang bersamaan (simultan) antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue. Adapun hasil uji simultan (uji F) dapat dilihat pada Tabel 4. 17 berikut:

**Tabel 4. 17**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	463.490	3	154.497	40.846	.000 <sup>b</sup>
	Residual	226.948	60	3.782		
	Total	690.437	63			

a. Dependent Variable: Efektifitas Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Pengolahan Data Primer oleh SPSS (2022)

Berdasarkan Tabel 4. 17 hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 40,846 dan nilai F tabel sebesar 2,76 sehingga nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ( 40,846 > 2,76) atau nilai signifikan (sig.) lebih kecil dari 0,05 ( 0,000 < 0,05) Sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian variabel independen akuntabilitas ( $X_1$ ), transparansi ( $X_2$ ), dan partisipasi ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen efektifitas pengelolaan dana desa (Y).

#### **4.8.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien Determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Koefisien determinasi  $R^2$  pada dasarnya mengukur seberapa baik model dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai  $R^2$  mendekati 1 menunjukkan bahwa hasil model regresi baik atau variabel bebas (independen) secara umum dapat menjelaskan variabel terikat (dependen). Sedangkan jika nilai  $R^2$  mendekati 0, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi (uji  $R^2$ ) dapat dilihat pada Tabel 4. 18 berikut:

**Tabel 4. 18**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	.819 <sup>a</sup>	.671	.655	1.945

a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Pengolahan Data Primer oleh SPSS (2022)

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh nilai R Square sebesar 0,671 yang artinya pengaruh variabel independen akuntabilitas ( $X_1$ ), transparansi ( $X_2$ ), dan partisipasi ( $X_3$ ) secara bersamaan dapat menjelaskan variabel dependen efektifitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 67,1%. Selebihnya sebesar 32,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **4.9 Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Pembahasan dari masing-masing variabel yang terdapat dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

### **4.9.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Berdasarkan Tabel 4. 13 diketahui nilai t hitung akuntabilitas sebesar 2,581 dan t tabel sebesar 2,000 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,581 > 2,000$ ) dengan nilai signifikan

akuntabilitas  $0,012 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel akuntabilitas (X1) berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Y).

Berdasarkan Tabel 4. 12 hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi X1 (akuntabilitas) sebesar 0,225 berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Y). Hal ini berarti jika setiap terjadi peningkatan akuntabilitas (X1) sebesar 1 satuan, maka efektivitas pengelolaan dana desa (Y) juga akan meningkat sebesar 0,225 (22,5%). Hasil ini sejalan dengan penelitian Umami & Nurodin (2020) yang menyatakan terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan dana desa dapat terlaksana dengan efektif maka diperlukan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa dalam mengelola keuangan.

Penerapan akuntabilitas dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu melingkupi aspek spiritual, mental dan material serta memperhatikan peranan manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* dan *abd'Allah*. Menurut Mulawarman (2011), manusia di muka bumi menjalankan dua peran yakni sebagai *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah) dan *abd' Allah* (hamba Allah).

Sebagai *khalifatullah fil ardh*, sudah seharusnya manusia bisa membawa keinginan Tuhan ke bumi untuk memakmurkan bumi dan seisinya dan sebagai *abd' Allah* sudah seharusnya manusia menjalankan semua perintah-Nya dalam rangka beribadah kepada-

Nya. Sesuai firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyaat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S. Adz-Dzariyaat : 56).

#### **4.9.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Berdasarkan Tabel 4. 13 diketahui nilai t hitung transparansi sebesar 2,900 dan t tabel sebesar 2,000 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,900 > 2,000$ ) dengan nilai signifikan transparansi  $0,005 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel transparansi ( $X_2$ ) berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ).

Hasil uji analisis regresi linier berganda pada Tabel 4. 12 dapat dilihat nilai koefisien regresi  $X_2$  (transparansi) sebesar 0,344 berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ). Hal ini berarti jika terjadi peningkatan transparansi ( $X_2$ ) sebesar 1 satuan, maka efektifitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ) juga akan meningkat sebesar 0,344 (34,4%). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Garini dan Ismiarti (2017) bahwa transparansi berhubungan positif dan signifikan pengelolaan keuangan. Semakin tinggi transparansi maka cenderung semakin baik pula informasi yang didapatkan setiap orang dalam mengetahui keandalan informasi tersebut.

Syari'ah Islam adalah kode hukum dan kode moral sekaligus. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, transparansi merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala aspek dalam bidang kehidupan, termasuk di dalam hal ekonomi . Jika transparansi atau kejujuran tidak diamalkan dalam kegiatan ekonomi, maka akan merusak keridhaannya (*uyub al-ridha*). Di samping itu, ketidakjujuran di dalam kesepakatan perjanjian akan berakibat perselisihan di antara para pihak. Firman Allah SWT dalam surat Al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. Al-Qashas: 56).

#### **4.9.3 Pengaruh Partisipasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui nilai t hitung partisipasi sebesar 4,994 dan t tabel sebesar 2,000 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel ( $4,994 > 2,000$ ) dengan nilai signifikan partisipasi  $0,000 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel

partisipasi (X3) berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Y).

Hasil uji analisis regresi linier berganda pada Tabel 4. 12 dapat dilihat nilai koefisien regresi X3 (partisipasi) sebesar 0,794 berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa(Y). Hal ini berarti jika setiap terjadi peningkatan partisipasi (X3) sebesar 1 satuan, maka efektivitas pengelolaan dana desa (Y) juga akan meningkat sebesar 0,794 (79,4%). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siti Umaira dan Adnan (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan dana desa.

Menurut Ali Abdul Halim (2017) mengatakan bahwa Allah SWT menyunnahkan semua muslim untuk berpartisipasi dalam hal kebajikan dengan diiringi ketakwaan kepada Allah SWT, sebab keridhaan Allah SWT terdapat dalam ketakwaan dan keridhaan manusia. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyatukan keduanya maka lengkaplah kebahagiaannya dan sempurna lah nikmatnya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,*

*sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]:2).*

#### **4.9.4 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Secara Bersamaan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana**

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 40,846 dan nilai F tabel sebesar 2,76 sehingga nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ( $40,846 > 2,76$ ) atau nilai signifikan (sig.) lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) Sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian variabel independen akuntabilitas ( $X_1$ ), transparansi ( $X_2$ ), dan partisipasi ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen efektifitas pengelolaan dana desa (Y).

Dapat dilihat juga hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada Tabel 4.15 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh nilai R Square sebesar 0,671 yang artinya pengaruh variabel independen akuntabilitas ( $X_1$ ), transparansi ( $X_2$ ), dan partisipasi ( $X_3$ ) secara bersamaan dapat menjelaskan variabel dependen efektifitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 67,1%.

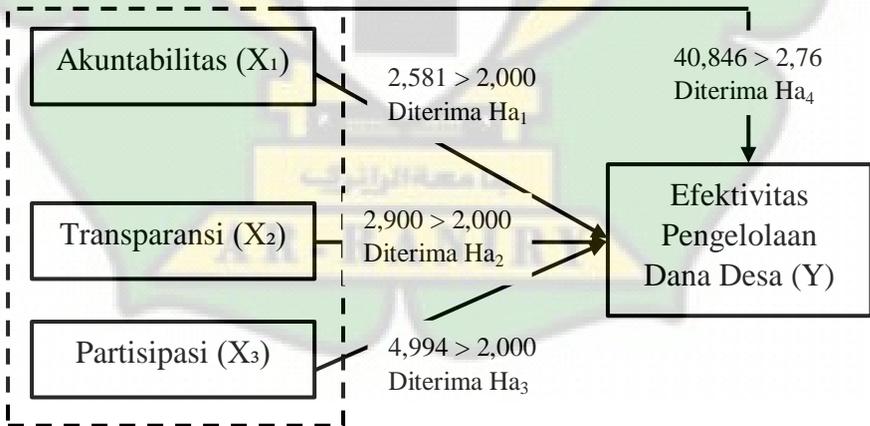
**Tabel 4. 19**  
**Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian**

<b>Hipotesis</b>	<b>Keterangan</b>
Ha <sub>1</sub> : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa	Diterima
Ha <sub>2</sub> : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa	Diterima
Ha <sub>3</sub> : Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa	Diterima
Ha <sub>4</sub> : Akuntabilitas, transparansi, partisipasi berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa	Diterima

Sumber: Pengolahan Data Primer oleh SPSS (2022)

Berikut gambaran hubungan variabel akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dapat dilihat pada kerangka pemikiran berikut:

**Gambar 4. 6**  
**Kerangka Pemikiran Setelah Pengujian**



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian pada variabel akuntabilitas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dengan nilai  $t$  hitung  $2,581 > 2,000$  dan nilai signifikan  $0,012 < 0,05$ . Artinya variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ). Pengelolaan dana desa akan terlaksana dengan efektif jika akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Lieue sudah terlaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa.
2. Hasil pengujian pada variabel transparansi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dengan nilai  $t$  hitung  $2,900 > 2,000$  dan nilai signifikan  $0,005 < 0,05$ . Artinya variabel transparansi ( $X_2$ ) berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ). Semakin baik transparansi dalam pemerintahan desa maka akan meningkat efektivitas pengelolaan dana desa dibuktikan dengan adanya baliho maupun papan pengumuman mengenai alokasi anggaran dana desa.

3. Hasil pengujian pada variabel partisipasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dengan nilai  $t$  hitung  $4,994 > 2,000$  dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Artinya variabel partisipasi ( $X_3$ ) berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ). Semakin aktif masyarakat dalam mengawasi dan keikutsertaan dalam kegiatan desa, maka akan cenderung meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.
4. Hasil pengujian secara simultan pada variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dengan nilai  $F$  hitung  $40,846 > 2,76$  atau nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ .

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Lieue diharapkan agar dapat lebih meningkatkan lagi akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan kesejahteraan didalam masyarakat. Dana desa diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih ikut berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang dan ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa sehingga semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan topik dana desa lainnya, sehingga dapat diketahui program mana saja yang memiliki dampak besar dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa*. 6(2), 334–344.

Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta

Arfah, T., & Jamilah, P. (2021). Ekonomi Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.56184/jkues.v5i2.135>

Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2013). *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. 3, 21–42.

Ardiana, I. P. E., & Tjukup, I. K. (2018). Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 6(02), 1–18.

Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. Sangaji: *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249. <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V4i2.491>.

Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (Jrmb) Fakultas Ekonomi Uniat*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/Jrmb.V4i1.237>.

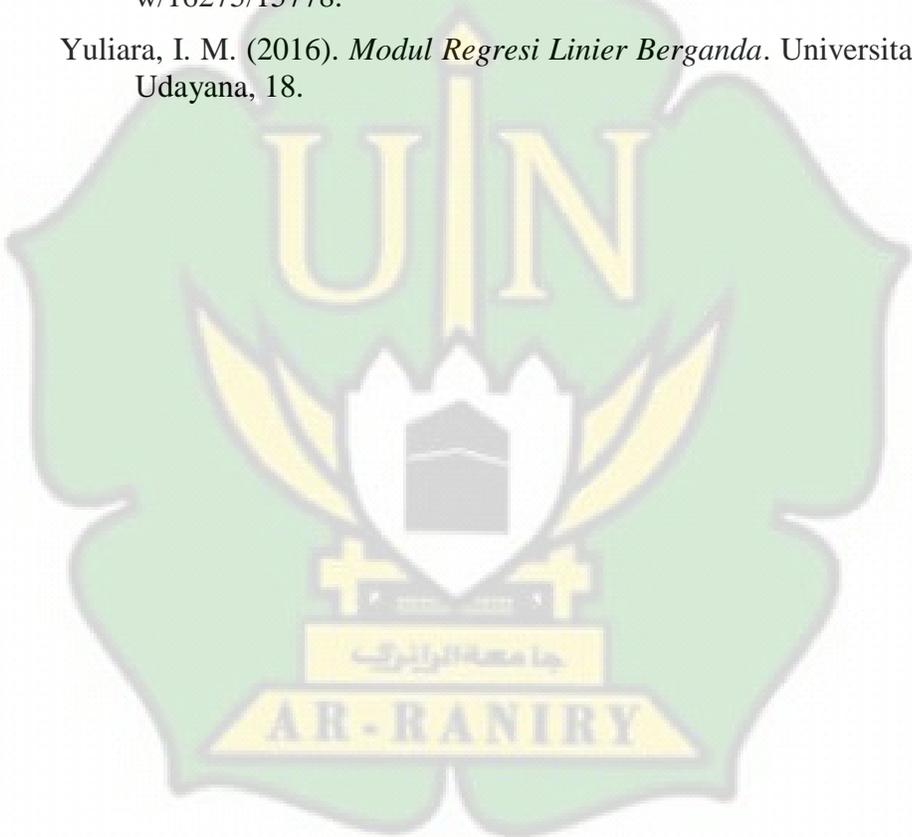
Basri, H. 2008. Accountability in Islamic Religious organizations: A Case Study of Pesantren in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam-Indonesia. *Proposal for PhD Thesis*, University Sains Malaysia.

- Dethan, M. A., & Cendana, U. N. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ): *Jurnal Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15–19.
- Darwanis, & Chairunnisa, S. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 6(2), 150–174.
- Dimiyati, A. H. (2016). Manajemen Keuangan Pendidikan Dalam Pandangan Islam. *I'TIBAR - Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 03(06), 132–146.
- Ghozali, I. (2016). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan Spss*. In Semarang University Press (Issue April 2012).
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.V10i1.9974>.
- Herion, Sumar'in, & Arifin, Z. (2022). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Aspek Pemberdayaan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. 1(1).
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213–221. <https://doi.org/10.24815/jimeka.V5i2.15556>
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2021). *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2021*. <https://updesa.com/pagu-dana-desa-tahun-2022/>
- Kartika, R. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 179–188.

<https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>.

- Lubis, Fadhillah. (2015). Prinsip Dasar Muamalah Keuangan Syariah (Maliyah). *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol 1 No 1*.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1).
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang*. April, 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Nurnasrina. (2013). Ekonomi Islam Sarana Dalam Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Madani. *Jurnal Hukum Islam*, XIII(1), 221–238.
- Nurhayati, N., & Saleh Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 68. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>.
- Onsardi, Marini, & Selvia, E. (2019). *Accountability in the Management of Village Fund From The Islam Perspective. Concept and Communication*, null(23), 301–316.
- Putra Darma, I. M. Y., & Rasmini, N. K. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. 28, 132–158.
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 8 (2021). *Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Des Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022*.
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 9–18. <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/viewfile/395/352>.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sudaryanti, D. (2011). Akuntansi dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi di Indonesia. *Tera Ilmu Akuntansi*, 10(1), 58–76.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tarean Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1),1–21. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Politico/Article/View/16275/15778>.
- Yuliara, I. M. (2016). *Modul Regresi Linier Berganda*. Universitas Udayana, 18.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

#### KUESIONER

**PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM DI DESA LIEUE KECAMATAN  
DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Dengan Hormat

Saya Zulfan Saputra mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Saat ini saya sedang melakukan penelitian ilmiah (skripsi) yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya bermaksud untuk meminta kesediaan anda untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini. Seluruh data yang anda berikan akan bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas seluruh waktu dan kerjasamanya yang telah anda berikan saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

**Hormat Saya**

**Zulfan Saputra**

## A. DATA RESPONDEN

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab pertanyaan ini dan memberi tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia:

### a. Identitas Pribadi

Nama : .....

Usia : ..... Tahun

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Pendidikan Terakhir :  SD  SMP

SMA/SMK  D3

S1  S2

S3

Pekerjaan : .....

Jabatan :  Perangkat  Masyarakat

Pengalaman menjadi perangkat desa : ..... Tahun

## B. PETUNJUK PENGISIAN

Berikanlah tanda checklist (√) pada kolom anda pilih sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

**Skor 5 = Sangat Setuju (SS)**

**Skor 4 = Setuju (S)**

**Skor 3 = Cukup Setuju (CS)**

**Skor 2 = Tidak Setuju (TS)**

**Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)**

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
<b>Akuntabilitas</b>						
1.	Pemerintah desa mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kepada umum.					
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan baik.					
3.	Pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan jujur serta terhindar dari penyalahgunaan jabatan.					
4.	Masyarakat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa.					
5.	Pemerintah desa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.					
<b>Transparansi</b>						
1.	Pemerintah terbuka dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa yang jujur dan benar.					
2.	Kemudahan untuk mengakses dokumen tentang anggaran dana desa.					
3.	Pemerintah desa selalu menyampaikan informasi tentang capaian dari program dana desa yang telah ditargetkan.					
4.	Dana desa selalu diinformasikan melalui pembuatan spanduk/baliho.					

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
<b>Partisipasi</b>						
1.	Masyarakat terlibat langsung dalam proses penyusunan program-program pengelolaan dana desa.					
2.	Masyarakat aktif pada saat pelaksanaan rapat-rapat proses pengambilan keputusan.					
3.	Masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, saran ataupun kritikan terhadap pengelola dana desa.					
<b>Efektivitas Pengelolaan Dana Desa</b>						
1.	Sumber daya yang digunakan untuk mengelola dana desa dimanfaatkan secara baik dan tepat.					
2.	Pengelolaan dana desa dilaksanakan secara ekonomis, menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.					
3.	Dana desa disalurkan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.					
4.	Penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.					
5.	Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan syariat islam yang berlaku.					

## Lampiran 2 Data Jawaban Responden

Data Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Akuntabilitas ( $X_1$ )						
No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Modus
1.	5	3	5	4	4	5
2.	4	4	4	4	3	4
3.	4	4	4	3	3	4
4.	4	4	5	4	4	4
5.	3	2	2	1	2	2
6.	5	5	4	5	5	5
7.	3	4	3	4	4	4
8.	3	2	3	2	3	3
9.	4	4	4	3	3	4
10.	4	4	5	5	4	4
11.	5	5	4	4	5	5
12.	3	4	2	3	4	3
13.	3	2	3	2	2	2
14.	4	4	3	3	4	4
15.	4	1	2	3	2	2
16.	5	4	5	4	4	4
17.	2	2	2	2	2	2
18.	3	1	2	2	2	2
19.	4	4	5	4	4	4
20.	3	3	4	5	3	3
21.	4	5	4	4	5	4
22.	5	4	4	5	5	5
23.	4	4	4	4	4	4
24.	3	3	4	4	4	4
25.	3	3	3	3	3	3
26.	3	2	3	3	2	3
27.	4	4	5	4	3	4
28.	4	3	3	3	3	3
29.	5	4	5	4	4	4

Lanjutan  $X_1$

Data Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Akuntabilitas ( $X_1$ )						
No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Modus
30.	5	4	5	5	5	5
31.	4	4	3	3	4	4
32.	5	5	5	4	4	5
33.	5	5	5	4	5	5
34.	4	4	4	3	3	4
35.	4	4	5	4	4	4
36.	4	4	4	5	3	4
37.	4	4	5	4	4	4
38.	3	3	4	3	3	3
39.	3	4	4	3	2	3
40.	4	5	5	4	4	4
41.	3	4	5	5	5	5
42.	5	4	4	5	4	4
43.	3	2	3	3	4	3
44.	4	3	3	3	4	3
45.	4	5	4	4	5	4
46.	4	3	4	4	4	4
47.	3	2	4	3	3	3
48.	4	3	2	3	2	3
49.	2	2	2	3	2	2
50.	4	5	5	4	4	4
51.	4	4	4	3	3	4
52.	4	4	4	3	3	4
53.	3	3	4	4	4	4
54.	5	5	4	4	3	5
55.	4	4	3	3	4	4
56.	5	5	5	5	4	5
57.	2	2	2	2	2	2
58.	3	4	4	3	3	3
59.	4	5	5	4	5	5

**Lanjutan X<sub>1</sub>**

<b>Data Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Akuntabilitas (X<sub>1</sub>)</b>						
<b>No.</b>	<b>X1.1</b>	<b>X1.2</b>	<b>X1.3</b>	<b>X1.4</b>	<b>X1.5</b>	<b>Modus</b>
60.	4	4	5	3	2	4
61.	3	3	3	3	4	3
62.	3	3	3	3	4	3
63.	3	3	3	3	3	3
64.	4	4	4	4	3	4

**Keterangan :**

**X<sub>1</sub>** : Akuntabilitas

<b>Data Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Transparansi (X<sub>2</sub>)</b>					
<b>No.</b>	<b>X2.1</b>	<b>X2.2</b>	<b>X2.3</b>	<b>X2.4</b>	<b>Modus</b>
1.	4	4	5	4	4
2.	3	4	5	4	4
3.	5	4	5	5	5
4.	5	3	5	5	5
5.	2	2	1	2	2
6.	5	5	5	5	5
7.	5	5	5	5	5
8.	4	5	5	4	4
9.	3	4	5	4	4
10.	5	5	5	5	5
11.	4	4	5	4	4
12.	3	4	5	5	5
13.	3	3	4	4	3
14.	5	5	5	5	5
15.	3	4	4	4	4
16.	4	4	5	5	4
17.	4	3	4	3	4
18.	3	3	3	3	3

Lanjutan X<sub>2</sub>

Data Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Transparansi (X <sub>2</sub> )					
No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Modus
19.	5	5	5	5	5
20.	3	3	4	4	3
21.	5	4	4	4	4
22.	4	4	5	5	4
23.	4	4	1	4	4
24.	4	3	4	4	4
25.	4	4	5	4	4
26.	3	3	4	3	3
27.	3	3	4	5	3
28.	4	5	3	4	4
29.	4	5	3	3	3
30.	5	5	5	5	5
31.	4	3	4	4	4
32.	5	3	4	5	5
33.	4	4	5	4	4
34.	4	4	4	4	4
35.	5	4	5	5	5
36.	4	4	5	5	4
37.	4	4	5	5	4
38.	4	4	5	5	4
39.	3	4	4	3	3
40.	4	5	5	5	5
41.	4	4	4	4	4
42.	5	4	4	5	5
43.	3	3	4	4	3
44.	3	4	5	4	4
45.	4	4	4	4	4
46.	3	3	5	5	3
47.	3	3	5	5	3

Lanjutan  $X_2$

Data Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Transparansi ( $X_2$ )					
No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Modus
48.	3	3	4	4	3
49.	3	4	5	5	5
50.	5	5	5	5	5
51.	4	4	5	4	4
52.	5	5	5	4	5
53.	4	3	5	5	5
54.	5	5	5	4	5
55.	4	3	5	5	5
56.	4	4	2	4	4
57.	3	3	3	3	3
58.	4	3	4	4	4
59.	5	5	5	5	5
60.	3	3	3	3	3
61.	4	4	4	4	4
62.	3	3	4	4	3
63.	3	3	4	3	3
64.	4	3	4	3	4

**Keterangan :**

$X_2$  : Transparansi

Data Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Partisipasi ( $X_3$ )				
No.	X3.1	X3.2	X3.3	Modus
1.	4	5	5	5
2.	3	3	4	3
3.	4	4	5	4
4.	4	4	5	4

Lanjutan X<sub>3</sub>

<b>Data Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Partisipasi (X<sub>3</sub>)</b>				
<b>No.</b>	<b>X3.1</b>	<b>X3.2</b>	<b>X3.3</b>	<b>Modus</b>
5.	2	2	2	2
6.	3	3	5	3
7.	4	4	5	4
8.	3	2	3	3
9.	3	4	4	4
10.	4	4	4	4
11.	4	4	4	4
12.	3	2	3	3
13.	2	3	3	3
14.	4	4	5	4
15.	2	3	3	3
16.	4	4	5	4
17.	3	3	2	3
18.	4	4	3	4
19.	4	4	4	4
20.	3	4	4	4
21.	3	4	4	4
22.	4	5	5	5
23.	4	4	4	4
24.	5	4	5	5
25.	4	4	4	4
26.	4	3	3	3
27.	4	5	4	4
28.	3	3	3	3
29.	4	4	4	4
30.	3	4	3	3
31.	4	4	3	4
32.	4	3	4	4
33.	4	4	4	4
34.	5	4	4	4

Lanjutan X<sub>3</sub>

<b>Data Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Partisipasi (X<sub>3</sub>)</b>				
<b>No.</b>	<b>X3.1</b>	<b>X3.2</b>	<b>X3.3</b>	<b>Modus</b>
35.	4	4	4	4
36.	5	4	5	5
37.	4	4	4	4
38.	4	4	5	4
39.	4	4	5	4
40.	3	4	4	4
41.	4	3	3	3
42.	3	2	3	3
43.	3	2	3	3
44.	3	3	3	3
45.	4	4	3	4
46.	3	3	5	3
47.	3	2	3	3
48.	3	3	4	3
49.	3	2	3	3
50.	4	4	5	4
51.	3	3	4	3
52.	3	4	4	4
53.	5	4	5	5
54.	4	4	5	4
55.	3	3	3	3
56.	4	4	4	4
57.	3	3	3	3
58.	3	3	3	3
59.	4	4	4	4
60.	4	3	4	4
61.	4	4	4	4
62.	3	3	5	3
63.	4	4	4	4
64.	4	4	4	4

**Keterangan :**

**X<sub>3</sub>** : Partisipasi

<b>Data Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Y)</b>						
<b>No.</b>	<b>Y1</b>	<b>Y2</b>	<b>Y3</b>	<b>Y4</b>	<b>Y5</b>	<b>Modus</b>
1.	5	4	4	3	3	4
2.	4	4	4	3	4	4
3.	4	5	5	5	5	5
4.	5	5	5	5	5	5
5.	2	2	2	3	2	2
6.	3	3	5	5	3	3
7.	4	4	4	4	5	4
8.	4	4	4	3	4	4
9.	4	5	3	3	4	4
10.	5	5	5	5	5	5
11.	5	5	5	5	5	5
12.	4	3	4	4	4	4
13.	3	3	3	3	4	3
14.	4	5	5	4	4	4
15.	3	3	3	2	3	3
16.	5	5	5	5	5	5
17.	3	3	3	2	3	3
18.	2	3	3	2	4	2
19.	4	4	4	4	5	4
20.	4	4	4	3	3	4
21.	5	4	5	5	5	5
22.	5	5	4	5	5	5
23.	4	4	4	4	4	4
24.	3	3	5	3	3	3
25.	4	4	4	4	4	4

Lanjutan Y

Data Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Y)						
No.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Modus
26.	4	4	5	3	4	4
27.	4	3	3	5	4	4
28.	3	3	4	4	4	4
29.	3	5	5	5	4	5
30.	3	4	3	4	5	3
31.	4	3	3	4	5	4
32.	4	4	4	4	4	4
33.	5	5	5	4	4	5
34.	4	4	4	4	4	4
35.	4	5	5	4	5	5
36.	4	5	5	5	5	5
37.	5	5	5	5	5	5
38.	4	5	4	4	4	4
39.	4	4	4	4	4	4
40.	5	5	5	5	5	5
41.	4	4	4	4	5	4
42.	3	3	4	3	3	3
43.	3	3	3	3	4	3
44.	4	4	4	3	4	4
45.	3	4	4	5	5	4
46.	3	4	4	4	5	4
47.	3	3	3	3	5	3
48.	3	4	4	4	3	4
49.	2	4	4	3	5	4
50.	5	5	5	5	5	5
51.	4	3	3	3	4	3
52.	4	5	5	5	5	5
53.	4	5	5	5	5	5
54.	5	4	4	4	5	4

### Lanjutan Y

Data Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Y)						
No.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Modus
55.	3	4	4	4	4	4
56.	4	5	5	5	5	5
57.	3	3	3	3	4	3
58.	3	3	3	3	4	3
59.	5	5	5	5	5	5
60.	4	4	5	4	5	4
61.	4	4	4	4	5	4
62.	4	3	3	3	4	3
63.	4	4	5	4	5	4
64.	3	4	4	3	4	4

**Keterangan :**

**Y** : Efektifitas Pengelolaan Dana Desa

### Lampiran 3 Hasil Analisis Output

#### Hasil Analisis Output

#### Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	22-32	15	23.4	23.4	23.4
	33-43	6	9.4	9.4	32.8
	44-54	32	50.0	50.0	82.8
	55-65	8	12.5	12.5	95.3
	66>	3	4.7	4.7	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

#### Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	33	51.6	51.6	51.6
	Perempuan	31	48.4	48.4	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

#### Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	1	1.6	1.6	1.6
	SMP	1	1.6	1.6	3.1
	SMA/SMK	39	60.9	60.9	64.1
	D3	4	6.3	6.3	70.3

	S1	18	28.1	28.1	98.4
	S2	1	1.6	1.6	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

### Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

<b>Pekerjaan</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruh	12	18.8	18.8	18.8
	Mengurus Rumah Tangga	10	15.6	15.6	34.4
	Pedagang	7	10.9	10.9	45.3
	Petani	13	20.3	20.3	65.6
	PNS	14	21.9	21.9	87.5
	Wiraswasta	8	12.5	12.5	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

### Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Menjadi Perangkat Desa

<b>Pengalaman Menjadi Perangkat Desa</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10 tahun	1	1.6	1.6	1.6
	12 tahun	1	1.6	1.6	3.1
	5 tahun	5	7.8	7.8	10.9
	6 tahun	5	7.8	7.8	18.8
	8 tahun	1	1.6	1.6	20.3
	9 tahun	3	4.7	4.7	25.0
	Tidak Pernah	48	75.0	75.0	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

## Lampiran 4 Uji Validitas dan Uji Reabilitas

### Validitas Akuntabilitas ( $X_1$ )

Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	SUM.X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.653**	.604**	.590**	.527**	.795**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	64	64	64	64	64	64
X1.2	Pearson Correlation	.653**	1	.684**	.625**	.641**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	64	64	64	64	64	64
X1.3	Pearson Correlation	.604**	.684**	1	.695**	.530**	.847**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	64	64	64	64	64	64
X1.4	Pearson Correlation	.590**	.625**	.695**	1	.662**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	64	64	64	64	64	64
X1.5	Pearson Correlation	.527**	.641**	.530**	.662**	1	.806**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	64	64	64	64	64	64
SUM.X1	Pearson Correlation	.795**	.871**	.847**	.852**	.806**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	64	64	64	64	64	64

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Reabilitas Akuntabilitas ( $X_1$ )

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.890	5

### Validitas Transparansi (X<sub>2</sub>)

Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	SUM.X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.638**	.367**	.519**	.797**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.000	.000
	N	64	64	64	64	64
X2.2	Pearson Correlation	.638**	1	.335**	.385**	.749**
	Sig. (2-tailed)	.000		.007	.002	.000
	N	64	64	64	64	64
X2.3	Pearson Correlation	.367**	.335**	1	.641**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.003	.007		.000	.000
	N	64	64	64	64	64
X2.4	Pearson Correlation	.519**	.385**	.641**	1	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000		.000
	N	64	64	64	64	64
SUM.X2	Pearson Correlation	.797**	.749**	.770**	.808**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	64	64	64	64	64

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Reabilitas Transparansi (X<sub>2</sub>)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.782	4

### Validitas Partisipasi (X<sub>3</sub>)

Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	SUM.X2
X3.1	Pearson Correlation	1	.535**	.459**	.789**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	64	64	64	64
X3.2	Pearson Correlation	.535**	1	.509**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	64	64	64	64
X3.3	Pearson Correlation	.459**	.509**	1	.822**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	64	64	64	64
SUM.X3	Pearson Correlation	.789**	.838**	.822**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	64	64	64	64

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Reabilitas Partisipasi (X<sub>3</sub>)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.747	3

### Validitas Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Correlations							
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	SUM.Y
Y1	Pearson Correlation	1	.638**	.546**	.554**	.453**	.782**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	64	64	64	64	64	64
Y2	Pearson Correlation	.638**	1	.736**	.646**	.570**	.879**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	64	64	64	64	64	64
Y3	Pearson Correlation	.546**	.736**	1	.665**	.422**	.827**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.000
	N	64	64	64	64	64	64
Y4	Pearson Correlation	.554**	.646**	.665**	1	.593**	.855**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	64	64	64	64	64	64
Y5	Pearson Correlation	.453**	.570**	.422**	.593**	1	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000		.000
	N	64	64	64	64	64	64
SUM.Y	Pearson Correlation	.782**	.879**	.827**	.855**	.736**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	64	64	64	64	64	64

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Reabilitas Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.875	5

## Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik

### Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.89798349
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.046
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

### Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.743	1.793		.972	.335	

Akuntabilitas	.225	.087	.265	2.581	.012	.521	1.919
Transparansi	.344	.119	.266	2.900	.005	.650	1.538
Partisipasi	.794	.159	.456	4.994	.000	.657	1.523

a. Dependent Variable: Efektifitas Pengelolaan Dana Desa

### Heteroskedastisitas

Correlations						
			Akuntabilitas	Transparansi	Partisipasi	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Akuntabilitas	Correlation Coefficient	1.000	.539**	.494**	.206
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.103
		N	64	64	64	64
	Transparansi	Correlation Coefficient	.539**	1.000	.383**	.137
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.002	.282
		N	64	64	64	64
	Partisipasi	Correlation Coefficient	.494**	.383**	1.000	.156

		Sig. (2-tailed)	.000	.002	.	.218
		N	64	64	64	64
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.206	.137	.156	1.000
		Sig. (2-tailed)	.103	.282	.218	.
		N	64	64	64	64
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						

### Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.743	1.793		.972	.335
	Akuntabilitas	.225	.087	.265	2.581	.012
	Transparansi	.344	.119	.266	2.900	.005
	Partisipasi	.794	.159	.456	4.994	.000
a. Dependent Variable: Efektifitas Pengelolaan Dana Desa						